

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENERAPAN
PERENCANAAN PAJAK PADA PERUSAHAAN
(STUDI PADA WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATU)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

JORDAN GILANG PRATAMA

NIM 105030400111069



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
MALANG**

2017

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan
Perencanaan Pajak pada Perusahaan (Studi Pada Wajib Pajak
Badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu)

Disusun oleh : Jordan Gilang Pratama

NIM : 105030400111069

Fakultas : Ilmu Administrasi

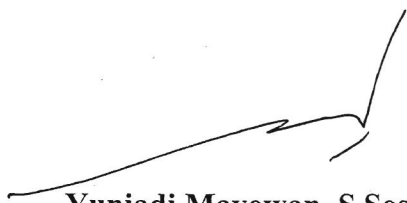
Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Prodi : Administrasi Perpajakan

Malang, 27 November 2016

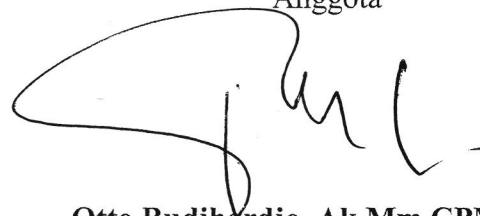
Komisi Pembimbing

Ketua



Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB
NIP. 19750614 200812 1 002

Anggota



Otto Budiwardjo, Ak,Mm.CPMA,BK
NIP.

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 16 Januari 2017

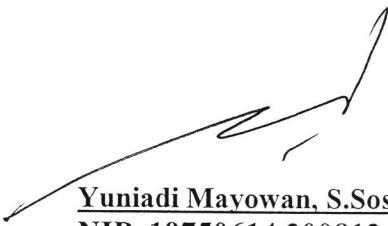
Jam : 09.00 WIB.

Skripsi atas nama : Jordan Gilang Pratama

Judul : Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan
Perencanaan Pajak pada Perusahaan (Studi Pada Wajib
Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Batu)

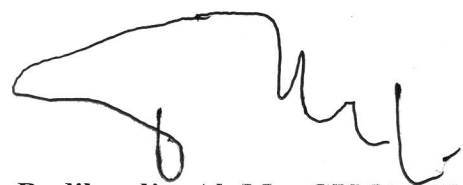
MAJELIS PENGUJI

Ketua



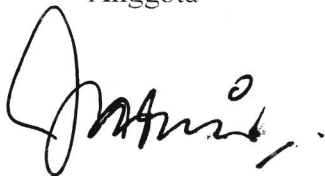
Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB
NIP. 19750614 200812 1 002

Anggota



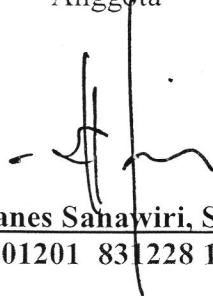
Otto Budihardjo, Ak,Mm,CPMA,BK
NIP.

Anggota



Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
NIP. 19600515 198601 1 002

Anggota



Brillyanes Sanawiri, SAB, MBA
NIP. 201201 831228 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Perencanaan Pajak Pada Perusahaan (Studi Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)**”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

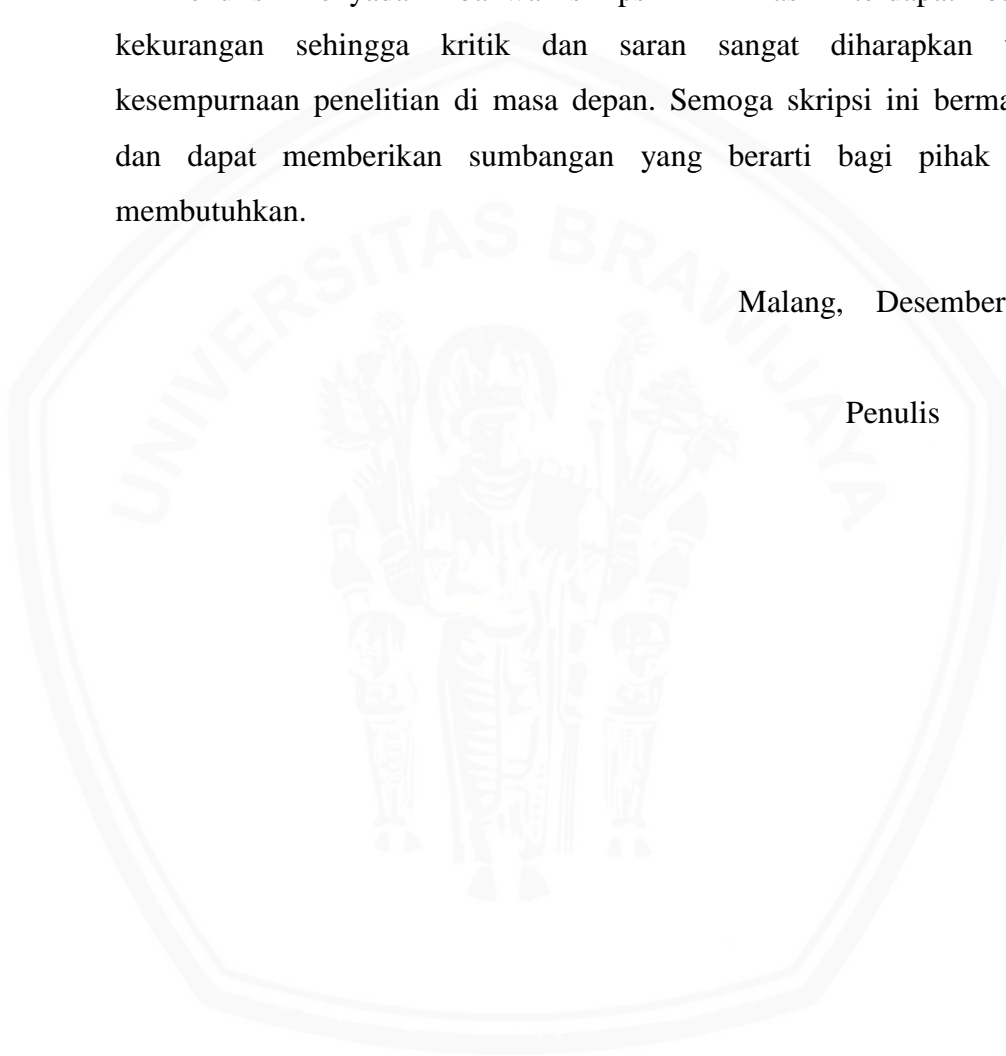
1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Dr. Kadarisman Hidayat M.Si Selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB Selaku Sekertaris Program Studi Perpajakan.
5. Yuniadi Mayowan, S.Sos selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Otto Budihardjo, Ak, MM selaku dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan masukan dalam proses penyempurnaan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perpajakan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama proses perkuliahan.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa depan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Desember 2016

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	9
B. Tinjauan Teoritis	
1. Dasar-Dasar Perpajakan.....	10
2. Definisi Pajak.....	11
3. Definisi Penghasilan.....	13
4. Pajak Penghasilan.....	13
5. Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan.....	15
6. Objek Pajak Penghasilan.....	16
7. Manajemen Pajak.....	17
8. Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>).....	18
9. Undang-Undang Perpajakan.....	29
10. Administrasi Perpajakan.....	30
11. Penerapan <i>Tax Planning</i> dalam Perusahaan.....	33
12. Hubungan Antar Variabel Penelitian.....	35

13. Model Hipotesis	39
---------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Sumber dan Jenis Data Penelitian	41
D. Metode Pengumpulan Data	42
E. Populasi dan Sampel Penelitian.....	42
F. Definisi Operasional Variabel.....	44
G. Skala Pengukuran	45
H. Metode Analisis Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	53
B. Gambaran Umum Responden.....	64
C. Diskripsi Jawaban Responden	66
D. Uji Validitas dan Reliabilitas	78
E. Metode Analisis Data.....	81
F. Pembahasan Hasil Penelitian.....	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	94

DAFTAR GAMBAR

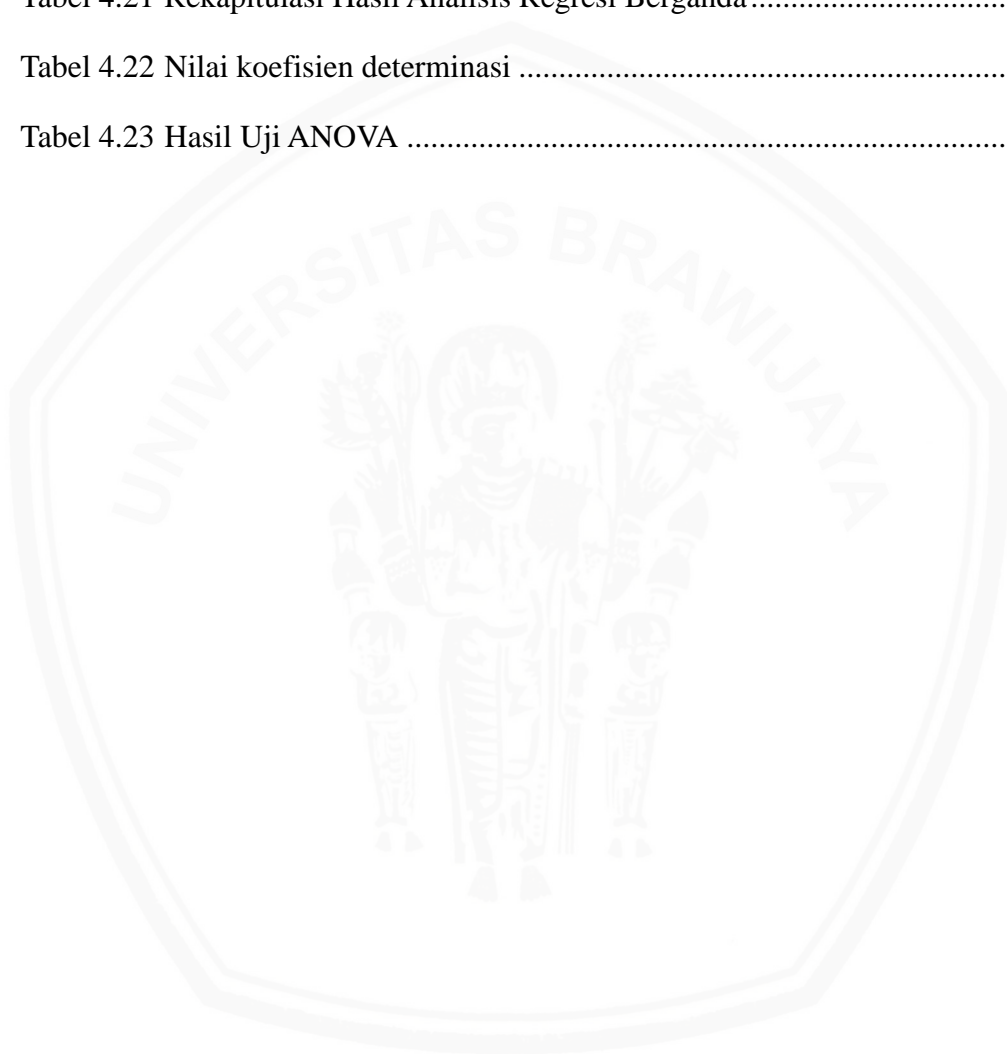
Gambar 2.2 Model Hipotesis	39
Gambar4.1 Pengaruh kebijakan perpajakan terhadap perencanaan pajak	91
Gambar4.2 Pengaruh undang-undang perpajakan terhadap perencanaan pajak.....	92
Gambar4.3 Pengaruh administrasi perpajakan terhadap perencanaan pajak	92



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Wajib Pajak Badan di KPP Batu Tahun 2012-2015.....	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel	44
Tabel 4.1	Wilayah Kerja KPP Pratama Batu.....	57
Tabel 4.2	Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.....	58
Tabel 4.3	Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin	58
Tabel 4.4	Komposisi pegawai berdasarkan agama	58
Tabel 4.5	Komposisi pegawai berdasarkan umur	59
Tabel 4.6	Komposisi pegawai berdasarkan masa kerja.....	59
Tabel 4.7	Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	64
Tabel 4.8	Distribusi Responden Berdasarkan Usia.....	65
Tabel 4.9	Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan	66
Tabel 4.10	Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel Perencanaan Pajak (Y)	67
Tabel 4.11	Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel Kebijakan Perpajakan (X_1)	70
Tabel 4.12	Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel Undang-Undang Perpajakan (X_2)	73
Tabel 4.13	Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel Administrasi Perpajakan (X_3)	75
Tabel 4.14	Uji Validitas Variabel Kebijakan Perpajakan (X_1).....	78
Tabel 4.15	Uji Validitas Variabel Undang-undang Perpajakan (X_2)	79
Tabel 4.16	Uji Validitas Variabel Tentang Administrasi Perpajakan (X_3).....	79

Tabel 4.17 Uji Validitas Variabel Perencanaan Pajak di KPP Batu (Y)	80
Tabel 4.18 Hasil Uji Reliabilitas	81
Tabel 4.19 Hasil Pengujian Multikolinearitas	82
Tabel 4.20 Hasil Uji Normalitas Data	84
Tabel 4.21 Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Berganda	85
Tabel 4.22 Nilai koefisien determinasi	86
Tabel 4.23 Hasil Uji ANOVA	87



RINGKASAN

Jordan Gilang Pratama, 2016, **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Perencanaan Pajak Pada Perusahaan (Studi Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)**, Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB dan Otto Budihardjo, Ak, MM. 95 Hal + x

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan penelitian ini adalah 1) Menganalisis pengaruh kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan secara parsial terhadap perencanaan pajak pada wajib pajak badan 2) Menganalisis pengaruh kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan secara simultan terhadap perencanaan pajak pada wajib pajak badan 3) Mengetahui faktor yang paling dominan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan perencanaan pajak pada wajib pajak badan.

Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif dengan pendekatan *explanatory* yaitu mengenai pengaruh kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan yang merupakan variabel *independent* dengan variabel *dependent*nya yaitu penerapan perencanaan pajak. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak badan yang terdapat di KPP Pratama Batu. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan uji F dan uji t.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa 1) kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap perencanaan pajak 2) kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap perencanaan pajak dan 3) Administrasi perpajakan paling dominan mempengaruhi penerapan perencanaan pajak.

Kata Kunci : *Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, Administrasi Perpajakan Dan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan.*

SUMMARY

Jordan Gilang Pratama, 2016, Analysis of Factors Affecting Implementation of Tax Planning in Company (Studies in taxpayer Registered Tax Office Pratama Batu), Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB and Otto Budihardjo, Ak, MM. 95 Things + x

Tax planning is the first step in tax management. Tax management is a means to fulfill tax obligations in accordance with the regulations, but the amount of tax paid can be minimized to obtain the expected profit and liquidity. The purpose of this study is 1) to analyze the effect of taxation policy, the tax laws and tax administration partially on tax planning in corporate taxpayers 2) Analyze the effects of taxation policies, laws, taxation and tax administration simultaneously on tax planning in corporate taxpayers 3) Knowing the most dominant factor affecting the implementation of tax planning in corporate taxpayers.

This type of research is quantitative with explanatory approach that is about the effect of tax policy, the tax laws and tax administration is an independent variable with a variable dependentnya namely the implementation of tax planning. The population in this study is that there are corporate taxpayers in KPP Pratama Batu. Data analysis technique used is multiple linear regression analysis by F test and t test.

The study says that 1) a policy of taxation, the tax laws and tax administration partially positive significant effect on tax planning 2) taxation policies, laws, taxation and tax administration simultaneously positive significant effect on tax planning and 3) Tax administration most dominant influence on the implementation of tax planning.

Keyword: *Tax Policy, Tax Law, Tax Administration and Tax Planning On the taxpayer.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang di pakai untuk menyediakan barang atau jasa publik. Secara administratif pungutan pajak di bagi dalam dua bagian yaitu pajak langsung (*direct tax*) dan pajak tidak langsung (*indirect tax*). Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang di terima atau di peroleh dapat dianggap sebagai beban atau biaya (*expense*) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah. Pajak akan menurunkan jumlah laba yang akan diterima oleh badan tersebut. Pajak sebagai beban akan membuat badan berusaha untuk menekannya. Cara yang dipakai untuk menekan beban pajak adalah dengan menggunakan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax*

planning) adalah untuk meminimalkan jumlah pajak.

Perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dengan baik dapat mengelola *cashflow* dengan optimal untuk pengeluaran-pengeluaran. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa *tax planning* akan membantu meminimalisasi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak tersebut yang tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. Dari pemahaman di atas maka peneliti tertarik untuk memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi *tax planning*.

Salah satu motivasi yang mendasari perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur, yaitu kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan (Suandy, 2011:66). Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan, dan dari berbagai aspek kebijakan pajak terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, diantaranya jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran pajak (Suandy, 2011:67)

Dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Undang-undang KUP) dapat diketahui bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa yang disebut wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Konsep Administrasi Perpajakan menurut Donovan dan Jackson dalam Keban (2005) yaitu: Administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis.” Jadi administrasi perpajakan dapat diartikan bahwa sebagai upaya atau cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.

Zain (2005:43) mengatakan bahwa perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik wajib pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Perencanaan pajak (*tax planning*) menekankan pada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak (Zain 2006). Kondisi tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum, yang dapat berupa penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran

pajak (*tax avoidance*) ataupun penyelundupan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* menunjuk pada rekayasa *tax affairs* yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*), sedangkan *tax evasion* berada di luar bingkai ketentuan perpajakan (*unlawful*).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu resmi didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Pembentukan KPP Patama Batu adalah bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam peningkatan pelayanan Kepada Wajib Pajak yaitu dengan pembentukan KPP Pratama di seluruh wilayah Kanwil Jawa Timur III pada tanggal 4 Desember 2007.

Perencanaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian-pengecualian dan celah-celah perpajakan (*loopholes*) yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dalam UU No. 36 Tahun 2008 (Undang-undang PPh) sehingga perencanaan pajak tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran yang akan merugikan Wajib Pajak dan tidak mengarah pada penggelapan pajak. Selain itu penetapan tarif pajak juga menjadi pertimbangan bagi pemilik usaha untuk melakukan perencanaan perpajakan. Kondisi ini juga terjadi pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu, dimana jumlah wajib pajak badan cenderung menunjukkan adanya peningkatan. Adapun jumlah wajib pajak badan yang tercatat di KPP Pratama Batu tahun 2012 sampai 2015 adalah

sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Badan di KPP Batu Tahun 2012-2015

Tahun	Jumlah Wajib Terdaftar	Peningkatan/ Penurunan	
		Jumlah	%
2012	3.102	-	
2013	3.560	458	14,76%
2014	3.977	417	11,71%
2015	4.623	646	16,24%

Sumber: KPP Pratama Batu

Tabel 1.1 menunjukkan adanya peningkatan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu tahun 2012 sampai 2015. Kondisi ini memberikan gambaran mengenai kemampuan KPP Pratama Batu dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak dan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Berdasarkan data tersebut juga dapat membuktikan bahwa pada periode tersebut KPP Pratama Batu memiliki kemampuan atau prestasi yang baik dalam memaksimalkan jumlah pajak wajib badan melalui pelayanan yang telah diberikan. Pertimbangan tersebut yang dijadikan dasar dalam melakukan pemilihan KPP Pratama Batu sebagai lokasi atau obyek penelitian. Berdasarkan uraian di atas maka judul dalam penelitian ini yaitu: **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Perencanaan Pajak Pada Perusahaan (Studi Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap perencanaan pajak pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu?
2. Apakah kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap perencanaan pajak pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu?
3. Faktor apakah yang paling dominan mempengaruhi penerapan perencanaan pajak pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Mengetahui pengaruh kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan secara parsial terhadap perencanaan pajak pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu.
- b) Mengetahui pengaruh kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan secara simultan terhadap perencanaan pajak pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu.
- c) Mengetahui faktor yang paling dominan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan perencanaan pajak pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu.

2. Manfaat Penelitian

- a) Bagi Peneliti: melalui penelitian ini, peneliti dapat mengetahui dalam pemahaman teori tentang perencanaan perpajakan sehingga mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di suatu perusahaan. Selain itu penulis dapat menambah wawasan pengetahuan serta kemampuan berfikir dalam bidang perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu.
- b) Bagi perusahaan: penelitian ini dapat membantu dalam mengevaluasi kinerja serta menjadi pertimbangan manajemen.
- c) Bagi Fiskus: hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan perencanaan pajak dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memberikan gambaran mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, serta sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori-teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, hubungan antar variabel penelitian serta hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan.

Bab ini menguraikan tentang penentuan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional, dan metode analisis yang digunakan.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan, meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data yang digunakan gambaran umum lokasi penelitian, dan penyajian data.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang berkaitan dengan kesimpulan yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan dipaparkan mengenai penelitian yang dilakukan terkait dengan pengaruh penerapan perencanaan pajak dalam meminimalkan pajak terutang wajib pajak badan. Hasil penelitian terdahulu yang digunakan dapat disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel	Teknik Analisis	Hasil
Herlina dan Agus (2013)	Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Wajib Pajak di Surabaya	Variabel bebas: tarif pajak, <i>loopholes</i> , sanksi administrasi, persepsi wajib pajak, dan moral wajib pajak. Variabel terikat yaitu perencanaan pajak wajib pajak badan di Surabaya	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perbedaan tarif pajak, <i>loopholes</i> , sanksi administrasi, persepsi wajib pajak, dan moral wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak wajib pajak badan di Surabaya.
Nyoman Darmayasa (2011)	Perencanaan Pajak dari Aspek Rasio Total <i>Benchmarking</i> , Kebijakan Akuntansi, dan Administrasi Sebagai Strategi Penghematan Pajak	Variabel bebas: Rasio Total <i>Benchmarking</i> , Kebijakan Akuntansi, dan Administrasi Variabel terikat yaitu Strategi Penghematan Pajak	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rasio total <i>Benchmarking</i> , kebijakan akuntansi, dan administrasi berpengaruh signifikan terhadap Strategi Penghematan Pajak

Nama Peneliti	Judul	Variabel	Teknik Analisis	Hasil
Mariyana dan Safitri (2014)	Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Dan Revaluasi Aset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak PT.Gembala Sriwijaya	Perencanaan pajak dan beban pajak	Analisis Deskriptif	Kesimpulan penelitian ini dengan dilakukannya penyusutan dan revaluasi aset tetap perusahaan maka PT. Gembala Sriwijaya dapat menghemat atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan

Sumber: Diolah dari Berbagai Referensi

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu mengenai obyek penelitian, teknik analisis data dan variabel penelitian yang digunakan.

Adapun persamannya yaitu sama-sama melakukan analisis mengenai perencanaan perpajakan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Dasar-Dasar Perpajakan

Pajak timbul dari adanya suatu kepentingan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama seperti keamanan, kebersihan, dan fasilitas umum lain. Negara dalam hal ini adalah salah satu kumpulan dari kelompok-kelompok yang merupakan kepentingan bersama dan membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Sistem Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2006:66) terdiri dari tiga sistem yaitu 1) *Self Assessment System* (SAS), merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 2) *Official Assessment System* (OAS), merupakan suatu sistem pemungutan yang

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan pajak terutang oleh Wajib Pajak. 3) *Withholding System*, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Waluyo (2011:2) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut Adriani dalam Waluyo (2009:2) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Sedangkan pengertian pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dari Pengertian pajak

tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
2. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi
3. Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah (tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah keuntungan)
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.

3. Definisi Penghasilan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan penghasilan (*income*) didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Sedangkan pengertian Penghasilan tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (Undang-Undang Pajak Penghasilan). Di dalam ketentuan tersebut disebutkan pada pasal 4 ayat (1) adalah :

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun

4. Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2011:135) pengertian pajak penghasilan adalah sebagai berikut: "Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak."

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menjadi subjek pajak adalah :

(1) Orang Pribadi

- (a) orang pribadi;
- (b) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;

(2) Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

(3) Bentuk usaha tetap.

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a) Tempat kedudukan manajemen
- b) Cabang perusahaan
- c) Kantor perwakilan
- d) Gedung kantor
- e) Pabrik
- f) Bengkel
- g) Gudang
- h) Ruang untuk promosi dan penjualan
- i) Pertambangan dan penggalian sumber alam
- j) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- k) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- l) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan

- m) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan
- n) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- o) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia
- p) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet

5. Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 3 dikatakan bahwa yang menjadi pengecualian dalam subjek pajak penghasilan adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing.
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

c. Organisasi-organisasi internasional, dengan syarat:

- 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, dan
- 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- 3) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

6. Subyek dan Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut, dimana terdapat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat 1 mengelompokkan subjek pajak menjadi 4 (empat) bagian yaitu "1). Subjek pajak orang pribadi 2). Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 3) Subjek pajak badan 4) Subjek pajak bentuk usaha tetap. Penjelasan mengenai Subjek Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut: 1) Subjek pajak orang pribadi yaitu orang pribadi yaitu subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia. 2) Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. 3) Subjek pajak badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha dan

4) Subjek pajak bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Resmi (2003:78) yang dimaksud dalam perpajakan adalah: “Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apa pun”.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan penghasilan mempunyai arti bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk menambah konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

7. Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan, 2006). Suandy (2008:6), tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari :

- (1) Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)
- (2) Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)
- (3) Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

8. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

a. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya untuk menekan beban pajaknya seminimal mungkin. Ada beberapa pengertian perencanaan pajak yang diungkapkan oleh para ahli antara lain:

Menurut Suandy, (2006:7) pengertian perencanaan pajak (*tax planning*) yaitu “upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang bertujuan untuk menghemat pajak dengan cara mengatur perhitungan penghasilan yang lebih kecil yang dimungkinkan oleh perundang-undangan perpajakan”. Menurut Zain (2006:43) perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Lumbantoruan dalam Agus (2011) menguraikan pendapatnya mengenai perencanaan pajak, yaitu “Perencanaan pajak adalah tahap pertama dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun

pada saat perencanaan. Rencana pengelakan pajak dapat ditempuh melalui: Pertama yaitu mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan. Kedua mengambil keuntungan dari bentuk-bentuk perusahaan yang tepat (bentuk yang menguntungkan dari sudut pandang perpajakan adalah perseorangan, firma dan kongsi; bila dibandingkan dengan perseroan karena akan dikenai pajak ganda, yang pertama atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dan kedua pada saat pemilik menerima atau memperoleh dividen). Ketiga yaitu menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak dan menjadi beberapa tahun untuk mencegah pengenaan tarif yang tinggi.”

Berdasarkan definisi tentang perencanaan pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak atau kewajiban pajaknya, tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku. Menurut Scholes dan Wolfson (1997) dalam Suandy (2009) ada tiga teknik dalam menerapkan perencanaan pajak yang efektif, yaitu:

1. *converting income from one type to another,*
2. *shifting income from one pocket to another,*
3. *shifting income one time periode to another.*

Cara pertama dilakukan dengan melakukan suatu perubahan terhadap perlakuan penghasilan dari suatu bentuk perlakuan tertentu, sehingga Wajib Pajak dapat menghemat pembayaran pajaknya. Misalnya

pada bulan September 2015 PT X mempunyai omset sebesar Rp500.000.000,00. Pembayaran bagi hasil tersebut dibayar oleh X setiap minggu pertama bulan berikutnya dan untuk pembayaran bulan September dilakukan pada bulan berikutnya. Cara yang yang kedua diterapkan dengan memindahkan pembayaran pada periode berikutnya. Biaya dialokasikan ke beberapa periode. Ketiga yaitu dengan melakukan penundaaan dalam proses pembayaran pajak. Penggunaan ketiga cara tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan dan jenis pos yang akan direncanakan, mana yang lebih menguntungkan.

b. Manfaat Perencanaan Pajak

Beberapa manfaat dalam pelaksanaan perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat menurut Suandy (2008:8) sebagai berikut:

- a) Mengatur alur kas, merupakan perencanaan yang dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kasnya dengan lebih akurat.
- b) Penghematan kas keluar, adalah perencanaan pajak yang dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan

Menurut Suandy (2008:7) tujuan *tax planning* secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal berikut:

1. Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali
2. Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan
3. Menunda pengakuan penghasilan

4. Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*
5. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru
6. Menghindari pengenaan pajak ganda
7. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

c. Aspek – Aspek dalam Perencanaan Pajak

Aspek dalam perencanaan pajak terbagi menjadi dua bagian, yaitu aspek formal dan administratif, dan aspek material. Menurut Suandy (2011:8) aspek formal dan administratif dari kewajiban perpajakan meliputi:

- (1) Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)
- (2) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
- (3) Memotong dan/atau memungut pajak;
- (4) Membayar pajak;
- (5) Menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Aspek Material Menurut Suandy (2011:9), pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan, perbuatan, maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat

mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar administrasi yang merupakan pemborosan dana). Untuk itu objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Pelaporan objek pajak yang benar dan lengkap harus bebas dari berbagai rekayasa negatif. Aspek material dalam perencanaan pajak Suandy (2011:19) :

1. Mengoptimalkan alokasi sumber dana
2. Objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap

d. Strategi Umum Perencanaan Pajak

Merencanakan strategi dan manajemen pajak adalah suatu keharusan bagi setiap perusahaan. Perusahaan yang dapat mengatur manajemen pajaknya akan dapat meningkatkan efisiensi kinerja karena berkurangnya beban pajak yang ditanggung perusahaan. Yang perlu diingat adalah manajemen pajak bukan berarti memanipulasi data pajak. Manajemen perencanaan pajak pada dasarnya adalah proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Berikut adalah strategi umum dalam membuat perencanaan pajak yaitu :a) *tax saving*, merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. b) *Tax avoidance* yaitu merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu

mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

a) Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:

1. Sanksi administrasi: denda, bunga, atau kenaikan;
2. Sanksi pidana: pidana atau kurungan.

b) Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

c) Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas impor, PPh Pasal 23 atas penghasilan jasa atau sewa dan lain –lain.

e. Langkah-langkah Perencanaan Pajak

Zain (2008:20) mengemukakan tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajak, maka langkah-langkah yang harus

mendapatkan perhatian dalam penyusunan perencanaan pajak dan merupakan komponen-komponen sistem manajemen adalah sebagai berikut.

- 1) Menetapkan sasaran atau tujuan perencanaan pajak yang meliputi:
 - a) usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b) Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.
 - c) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23)
- 2) Situasi sekarang dan identifikasi pendukung maupun penghambat tujuan, yang terdiri dari:
 - a) Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang.
 - b) Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab perpajakan serta memiliki manual tentang ketentuan dan tata cara manajemen perpajakan yang

berlaku bagi seluruh personil perusahaan.

- c) Strategi dan perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan, baik perencanaan perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

3) Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, dilakukan antara lain dengan cara mengadakan :

- a) Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang memonitor perpajakan dan kepastian keefektifan pengendalian pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang terkait, seperti pencantuman masalah-masalah perpajakan dalam kontrak bisnis, sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal-hal tersebut sangat erat kaitannya dengan sistem akuntansi perusahaan.
- b) Mekanisme monitor, pengendalian dan penyesuaian sedemikian rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.

f. Motivasi Melakukan Perencanaan Pajak

Dalam penelitian ini, membatasi faktor-faktor yang memotivasi manajemen perusahaan melakukan *tax planning* menurut Suandy (2011:10) yaitu kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan.

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan dari berbagai aspek kebijaksanaan pajak, berikut akan diuraikan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak (Suandy, 2011:11) yaitu:

a. Pajak yang akan dipungut

Di dalam sistem perpajakan ada berbagai tipe pajak yang harus menjadi pertimbangan utama baik berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung dan cukai seperti:

- 1) Pajak penghasilan badan dan perseorangan
- 2) Pajak atas keuntungan modal (*capital gains*)
- 3) *Withholding tax* atas gaji, dividen, sewa, bunga, royalti, lain-lain.
- 4) Pajak atas impor, ekspor, serta bea masuk.
- 5) Pajak atas undian/hadiah.
- 6) Bea materai.
- 7) *Capital Transfer taxes/transfer duties*.
- 8) *Business licence* dan *trade taxes* lainnya.

Terdapat berbagai kewajiban jenis pajak yang harus dibayar di mana masing-masing jenis pajak tersebut mempunyai sifat perlakuan pajak sendiri-sendiri. Misalnya bea masuk dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak atau bisa

dimintakan restitusi apabila kita melakukan ekspor barang, sedangkan pajak penghasilan adalah pajak atas laba atau penghasilan kena pajak yang dapat mengurangi besarnya penghasilan bersih setelah pajak. Maka agar tidak mengganggu atau tidak memberatkan arus kas perusahaan, diperlukan perencanaan pajak yang baik untuk bisa menganalisis atas transaksi apa akan terkena pajak yang mana dan berapa dana yang diperlukan, sehingga dapat diketahui berapa penghasilan bersih setelah pajak.

2. Subjek Pajak

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut “*the classical system*” dimana ada pemisahan antara Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi (Suandy, 2011:11). Adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen badan usaha kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha menyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak dengan baik agar beban pajak rendah sehingga sumber daya perusahaan bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain. Di samping itu, ada pertimbangan untuk menunda pembayaran dividen dengan cara meningkatkan jumlah laba yang ditahan bagi perusahaan yang juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak.

3. Objek Pajak

Objek pajak merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk laporan. Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah. Sebagai contoh, transaksi modal perseroan atas dividen dan *capital gains*, di mana atas pembayaran dividen kepada pemegang saham perorangan diterapkan tarif *progressive*. Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan sedangkan *capital gains* dikenakan pajak *flat rate* sebesar 0,1% atau 0,6% dari jumlah bruto nilai penjualan saham. Karena objek pajak merupakan basis perhitungan besarnya pajak, maka untuk optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih dan tidak kurang.

4. Tarif Pajak

Adanya tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak akan berusaha sedapat mungkin dikenakan tarif yang paling rendah. Menurut Supramono dan Damayanti (2010:7), Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar

5. Prosedur Pembayaran Pajak

Adanya *self assessment system* dan *payment system* mengharuskan seseorang perencanaan pajak untuk merencanakan pajak dengan baik (Suandy, 2011: 12). Saat ini sistem pemungutan *withholding tax* di Indonesia makin ditingkatkan penerapannya. Hal ini di samping

mengganggu arus kas perusahaan juga bisa mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pemungutan pendahuluan tersebut, padahal untuk memperoleh restitusi atas kelebihan tersebut diperlukan waktu dan biaya.

9. Undang-Undang Perpajakan

Undang-undang perpajakan adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur masalah perpajakan. Pada kenyataannya dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Direktur Jendral Pajak), maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan yang lain yang ingin dicapainya (Suandy, 2011: 13).

Seperti diketahui, *tax planning* merupakan suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut. Melaksanakan *tax planning* dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan ini menyebabkan munculnya peluang bagi wajib pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan merencanakan pajak yang baik. Wajib pajak dapat mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajaknya.

Pada awal mendirikan usaha, wajib pajak juga dapat melakukan *tax planning* dengan cara memanfaatkan undang-undang pajak yang

berlaku. Pada masa sekarang ini, Wajib Pajak harus cermat dalam memilih lokasi usaha yang akan didirikan. Hal ini disebabkan, adanya lokasi-lokasi usaha tertentu yang memperoleh fasilitas yang lebih dibanding dengan lokasi/kawasan lainnya. Apabila wajib pajak ingin mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah maka wajib pajak dapat memilih lokasi usaha di daerah tertentu, misalnya di Indonesia Bagian Timur.

Dengan mendirikan usaha di daerah tersebut, maka Wajib Pajak dapat memperoleh banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud undang-undang pajak penghasilan Pasal 26. Di samping itu juga diberikan fasilitas seperti penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya.

Hasil suatu *tax planning* bisa dikatakan baik atau tidak tergantung dengan apa yang kita lakukan dan semua itu harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kadang-kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya peraturan perundang-undangan. Tindakan perubahan tersebut harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya/kemungkinan keberhasilannya sangat kecil.

10. Administrasi Perpajakan

Menurut Suandy (2008:12) secara umum motivasi dilaksanakannya *tax planning* adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak, Karena pajak ikut mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang atau

kesempatan yang ada dalam ketentuan perpajakan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas obyek pajak yang secara ekonomi hakekatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak (*tax rate*), perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*tax base*) dan *loopholes* (celah) *shelters* (menampung) *haven* (perlindungan)

Administrasi Perpajakan Menurut Ensiklopedi perpajakan yang ditulis oleh Lumbantoruan (2005:19) Administrasi Perpajakan yaitu: “Administrasi Perpajakan (*Tax administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak”. Mengenai peran administrasi perpajakan, Pandiangan (2007:33) Mengemukakan bahwa: “Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan Negara sebagaimana amanat APBN”.

Administrasi perpajakan merupakan salah satu dari tiga unsur perpajakan lainnya, yaitu kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Menurut Nurmantu (2005:7) menyatakan: “ Penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak.”

Menurut Jantscher (2005:20) “Menekan peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman diberbagai negara berkembang, kebijakan perpajakan yang

dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan mampu melaksanakannya”.

Administrasi pajak menurut Nurmantu (2005:7) mempunyai dua pengertian, yakni administrasi pajak dalam arti luas dan administrasi dalam arti sempit.

a. Pengertian Administrasi Pajak dalam Arti Sempit

Administrasi pajak dalam arti sempit adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan dalam kegiatan penatausahaan adalah:

1. Pencatatan (*Recording*)
2. Penggolongan (*Classifying*)
3. Penyimpanan (*Filing*)
4. Pelayanan (*Serving*)
5. Menghitung dan Memperkirakan (*Assesing*)
6. Memeriksa (*Auditing*)
7. Menagih (*Collecting*)

b. Pengertian Administrasi Pajak dalam Arti Luas

Administrasi dalam arti luas dapat dilihat sebagai berikut:

1. Fungsi, meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan.
2. Sistem, seperangkat unsur yang saling berkaitan yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan menyelesaikan suatu tugas tertentu.

3. Lembaga, sebagai salah satu Direktorat Jendral Pajak pada Departemen Keuangan Republik Indonesia yang terwujud pada adanya kantor - kantor mulai dari kantor pelayanan pajak, dan kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak.

11. Penerapan *Tax Planning* dalam Perusahaan

Secara umum penghematan pajak mengandung prinsip membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan dalam waktu terakhir yang masih dibolehkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Menurut Suandy (2011:121) terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam penerapan *tax planning* untuk mengefisienkan beban pajaknya, diantaranya:

- a. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.
- b. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam intensif pajak atau fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu.
- c. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari pengecualian atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak. Seperti apabila diketahui bahwa Penghasilan Kena Pajak perusahaan besar dan akan mengakibatkan pajak terhutang besar, sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk penelitian dan pengembangan, biaya pendidikan, biaya training yang boleh dikurangi dari penghasilan kena pajak.
- d. Penempatan modal perusahaan kepada perseroan terbatas lebih

menguntungkan kalau besarnya modal yang disetor paling rendah 25%

- e. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura / kenikmatan dapat dipilih sebagai alternatif untuk mengefisienkan pajak
- f. Pemilihan metode penilaian persediaan dengan metode *Average* daripada FIFO. Karena pada kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, penetapan metode *Average* akan menghasilkan HPP lebih tinggi dari pada FIFO. Dengan HPP lebih tinggi, akan mengakibatkan laba kena pajak akan semakin rendah.
- g. Untuk pendanaan aktiva tetap lebih menguntungkan secara leasing dengan hak opsi dibandingkan pembelian langsung.
- h. Pemilihan metode penyusutan jika prediksi laba cukup besar sebaiknya menggunakan metode saldo menurun. Tapi jika pada awal investasi tidak dapat memberikan keuntungan, maka metode garis lurus lebih menguntungkan.
- i. Menghindari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan transaksi pada yang bukan objek pajak.
- j. Mengoptimalkan kredit pajak. Jangan sampai kredit pajak tersebut menjadi biaya pajak karena akan merugikan. Apabila pajak yang telah dibayar dimuka, dikreditkan, maka kredit pajak akan dapat kembali 100 %. Tetapi apabila pajak yang telah dibayar dimuka dibiayakan, maka pajak yang sudah dibayar hanya kembali 75%.
- k. Penundaan pembayaran kewajiban pajak sampai akhir batas jatuh tempo.
- l. Menghindari lebih bayar untuk menghindari kerugian finansial dan

menghindari pemeriksaan pajak

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa selama ini perusahaan selalu berupaya untuk melakukan efisiensi atas sejumlah pajak yang harus dibayarkan yaitu dengan menggunakan beberapa strategi yang dapat digunakan yaitu dengan melakukan penerapan *tax planning* sehingga tujuan efisiensi biaya dapat dilaksanakan oleh pemilik usaha.

12. Hubungan Antar Variabel Penelitian

a. Hubungan Kebijakan Perpajakan Dengan Perencanaan Pajak

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yg menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tata pemerintahan, organisasi, dan lain-lain); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan. Menurut pendapat Mansury (2005) bahwa pengertian kebijakan pajak adalah merupakan bentuk pengalihan sumber daya dari sektor swasta kepada sektor publik (Negara), karena penduduk yang bersangkutan mempunyai kemampuan secara ekonomis yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan tanpa mendapat imbalan yang langsung ditunjuk dalam rangka memenuhi tujuan ekonomi sosial negaranya.

Jadi tujuan kebijakan perpajakan adalah sama dengan kebijakan publik pada umumnya, yaitu mempunyai tujuan pokok: 1) Untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran, 2) Distribusi penghasilan yang lebih adil, dan 3) Stabilitas. Kebijakan mengenai perpajakan tersebut tidak terlepas dari

upaya untuk melakukan perencanaan pajak, untuk itu sebelum melakukan perencanaan pajak seorang perencana pajak harus mengetahui jenis-jenis perencanaan pajak terlebih dahulu. Menurut Suandy (2006:122) jenis-jenis perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Perencanaan pajak nasional (*national tax planning*) dan 2) Perencanaan pajak internasional (*international tax planning*). Dari kedua jenis perencanaan pajak tersebut terdapat perbedaan yang melekat, yaitu terletak pada peraturan pajak yang akan digunakan. Dalam perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan undang-undang domestik. Sedangkan perencanaan pajak internasional disamping undang-undang domestik juga harus memperhatikan perjanjian pajak dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat dan pelaksanaannya terkait dengan kebijakan perpajakan yang telah ditetapkan.

b. Hubungan Antara Undang-Undang Perpajakan Dengan Perencanaan Pajak

Sebagaimana diketahui bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assesstment* yaitu negara dalam hal ini pemerintah memberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak warganya sendiri (disebut Wajib Pajak). Contoh penerapan sistem ini adalah pelaksanaan hak dan kewajiban pajak penghasilan untuk perusahaan (badan) ataupun Orang Pribadi. Di sinilah sangat dibutuhkan kesadaran dari warga Negara/masyarakat untuk selalu patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Disamping memberi kepercayaan penuh kepada warga masyarakat, namun apabila terdapat data atau keterangan yang

diperoleh Pemerintah (DJP) berbeda dengan data pelaporan pajak Wajib Pajak maka DJP berperan melakukan uji kepatuhan terhadap kewajiban yang telah dilaksanakan wajib pajak tersebut melalui pemeriksaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan dihubungkan dengan kondisi perekonomian kita saat ini yang tidak lepas dari peran tenaga ahli seperti dokter, pengacara, akuntan, konsultan pajak dan lain-lain, maka perlu kiranya dipersiapkan sedini mungkin perencanaan pajak untuk tenaga ahli agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perlu diketahui bahwa perencanaan pajak dengan tujuan meminimalisir pembayaran pajak masih dapat diperkenankan apabila tetap dibawah koridor peraturan perundang-undangan perpajakan (*tax avoidance*), tapi meminimalisir pembayaran pajak yang melanggar peraturan yang sangat tidak diperkenankan (*tax advice*).

c. Hubungan Antara Administrasi Perpajakan Dengan Perencanaan Pajak

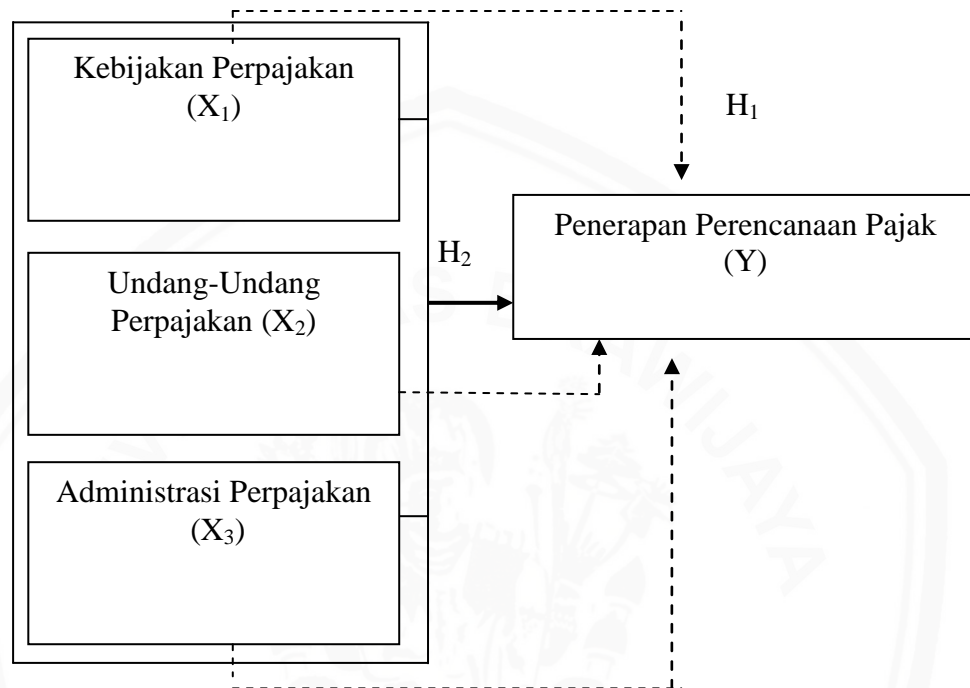
Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Administrasi Perpajakan menurut Lumbantoruan (2005:19) yaitu: “Administrasi perpajakan (*tax administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak”. Mengenai peran administrasi perpajakan, Pandiangan (2007:33) mengemukakan bahwa: “Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN”. Jadi administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan terkait dengan bidang perpajakan. Jadi administrasi perpajakan terkait secara langsung dengan upaya perencanaan pajak yang akan dilakukan.

13. Model Hipotesis

Gambar 2.1
Model Hipotesis



Keterangan :

- > = Pengaruh simultan
 - - - - -> = Pengaruh parsial

Berdasarkan kerangka konsep dan hipotesis di atas, maka rumusan hipotesis penelitian yang dapat diajukan adalah:

H₁ : Terdapat pengaruh signifikan kebijakan perpajakan terhadap perencanaan pajak

H₂ : Terdapat pengaruh signifikan undang-undang perpajakan terhadap perencanaan pajak

H₃ : Terdapat pengaruh signifikan administrasi perpajakan terhadap

perencanaan pajak.

H₄ : Terdapat pengaruh signifikan kebijakan perpajakan, undang- undang perpajakan dan administrasi perpajakan terhadap perencanaan pajak



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif dengan pendekatan *explanatory* yaitu mengenai pengaruh kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan yang merupakan variabel *independent* dengan variabel *dependentnya* yaitu penerapan perencanaan pajak.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama KPP Pratama Batu terletak di Jl. Letjen. S. Parman No.100 Malang, satu gedung dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III

C. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya, diambil, dan dicatat pertama kali oleh peneliti. Untuk memperoleh data primer tersebut, peneliti menggunakan teknik kuisisioner. Kuisisioner berisikan daftar pertanyaan yang akan diisi oleh responden dan akan digunakan untuk mengukur variabel-variabel penelitian ini.
2. Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Kuisisioner (angket)

Menurut Sugiyono (2011:135), “Kuisisioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Dalam penelitian ini, digunakan daftar pertanyaan bersifat tertutup, dimana alternatif jawaban telah disediakan.

2. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006:231), selain pengumpulan data primer juga dilakukan pengumpulan data sekunder yaitu “melalui teknik dokumentasi, langkah ini berupa kegiatan mengumpulkan data-data sekunder yang dianggap berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan”.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2011:72) yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah wajib pajak badan yang terdapat di KPP Pratama Batu.

2. Sampel

Sedangkan yang dimaksud sampel menurut Sugiyono (2011:73), yaitu: “Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Selain itu adanya pengambilan sampel dimaksudkan untuk memperoleh

keterangan mengenai obyek-obyek penelitian dengan cara mengamati sebagian populasi. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi namun tetap mampu mewakili populasi tersebut. Adapun dasar yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah menggunakan rumus Slovin dalam Umar (2001:108). Adapun pertimbangan yang digunakan yaitu jumlah populasi dapat diketahui secara jelas, dan persamaan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

n = Jumlah Sampel

N= Jumlah Populasi

e = Presentase kesalahan yang digunakan (5%)

Berdasarkan rumus tersebut maka jumlah sampel dapat ditentukan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{4.623}{1 + 4.623(0,1)^2} \\ &= 97,88 \end{aligned}$$

Jumlah sampel penelitian yaitu sebanyak 100 responden.

F. Definisi Operasional Variabel

Dalam Sugiyono (2011:38), pada dasarnya variabel penelitian adalah atribut seseorang, atau objek, yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain, objek atau kegiatan yang

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas).

1. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi perubahan variabel independen. Dalam hal ini variabel independen yaitu mengenai penerapan perencanaan pajak (Y)

2. Variabel Bebas (Independen)

Merupakan variabel yang mempengaruhi perubahan variabel dependen, dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan perpajakan (X_1)
2. Undang-undang Perpajakan (X_2)
3. Administrasi Perpajakan (X_3)

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Item
Kebijakan perpajakan (X_1)	Merupakan bentuk kebijakan terkait dengan sistem pemungutan, subjek pajak dan pajak yang dipungut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan sistem pemungutan pajak. ▪ Besarnya nilai pajak yang dipungut ▪ Subyek pajak yang menjadi sumber pendapatan pajak. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketepatan sistem pemungutan pajak. ▪ Kemudahan sistem pemungutan pajak. ▪ Kesesuaian nilai pajak dengan jumlah pajak yang harus dibayar Wajib Pajak. ▪ Nilai pajak menggunakan perhitungan secara jelas ▪ Ketepatan dalam penetapan wajib pajak. ▪ Subyek pajak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
Undang-undang Perpajakan (X_2)	Pokok peraturan yang ditetapkan dalam penetapan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penentuan PPh final. ▪ Penghasilan kena pajak ▪ Besarnya pajak penghasilan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kejelasan dalam penetapan PPh final ▪ PPh final memiliki kepastian sesuai dengan kewajiban perpajakan. ▪ Ketepatan dalam penetapan

			<ul style="list-style-type: none"> penghasilan kena pajak Ketepatan dalam perhitungan pajak penghasilan Besarnya pajak sesuai dengan beban pajak yang dipenuhi oleh wajib pajak.
Administrasi Perpajakan (X_3)	Administrasi perpajakan dapat diartikan sebagai bentuk arahan, dan untuk menciptakan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan terkait dengan kebijakan perpajakan.	<ul style="list-style-type: none"> Sistem perhitungan pajak. Pembayaran pajak tepat waktu Upaya menghindari sanksi administrasi pajak. 	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan dalam penentuan jumlah pajak. Perhitungan pajak dilakukan secara cermat Penetapan batas waktu pembayaran pajak. Penetapan sanksi bagi WP yang melanggar waktu pembayaran pajak. Pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perencanaan pajak (Y)	Upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang bertujuan untuk menghemat pajak dengan cara mengatur perhitungan penghasilan yang lebih kecil yang dimungkinkan oleh perundang-undangan perpajakan.	<ul style="list-style-type: none"> Upaya melakukan pembayaran pajak yang lebih rendah Melakukan penundaan pajak penghasilan Menghapus/menghilangkan pajak tahun berjalan. Menghindari pengenaan pajak ganda. 	<ul style="list-style-type: none"> Memilih sistem yang tepat dalam melakukan pembayaran pajak. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan sehingga terhindar dari denda. Melakukan penundaan membayar pajak dengan harapan memiliki kesempatan untuk membayar pajak dengan lebih rendah. Penetapan waktu yang tepat dalam melakukan pembayaran pajak. Melakukan rekapitulasi dalam proses pembayaran pajak. Melakukan pemisahan pendapatan secara tepat ketika melakukan pembayaran pajak.

G. Skala Pengukuran

Alat yang digunakan dalam pembuatan kuisioner adalah skala Likert.

Skala ini banyak digunakan dalam penelitian sikap masyarakat. Menurut

Malhotra (2005:299) skala Likert adalah “skala yang digunakan secara luas

yang meminta responden menandai derajat persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap masing-masing dari serangkaian pernyataan mengenai obyek stimulus”. Responden diminta untuk menjawab setiap pertanyaan, adapun penilaian jawaban dari responden:

- | | | |
|----------------------------------|--------|---------|
| 1. Jawaban “Sangat Setuju” | diberi | Nilai 5 |
| 2. Jawaban “Setuju” | diberi | Nilai 4 |
| 3. Jawaban “Netral” | diberi | Nilai 3 |
| 4. Jawaban “Tidak Setuju” | diberi | Nilai 2 |
| 5. Jawaban “Sangat Tidak Setuju” | diberi | Nilai 1 |

H. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Tahapan analisis data yang akan dilakukan dengan menggunakan computer SPSS 16 *for windows*.

1. Pengujian Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Menurut Widayat (2004:87) validitas adalah “suatu pengukuran yang mengacu pada proses dimana pengukuran benar-benar bebas dari kesalahan sistematis dan kesalahan random”. Pengukuran yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Pada penelitian ini, digunakan validitas *Pearson* berdasarkan rumus korelasi *product moment*. Adapun kriteria pengujiannya adalah:

Apabila $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ maka tidak terdapat instrumen yang valid pada tingkat kepercayaan 95% dan apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ terdapat instrumen yang valid pada tingkat kepercayaan 95% atau dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05). Nilai r hitung dapat diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{n \cdot \sum XY - (\sum X) \cdot (\sum Y)}{\sqrt{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2} \cdot \sqrt{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Dimana:

r = Koefisien Korelasi

n = Jumlah sampel

X = Skor tiap butir

Y = Skor Total

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana instrumen tersebut dapat diberikan hasil yang relatif sama bisa dilakukan pengukuran kembali terhadap subyek yang sama. Suatu instrumen yang mempunyai reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen tersebut memiliki kehandalan untuk digunakan suatu pengukuran. Suatu alat ukur yang baik tidak berubah-ubah pengukurannya, artinya meskipun alat itu digunakan berkali-kali akan memberikan hasil yang hampir serupa.

Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur dengan metode konsistensi internal dengan teknik Reliabilitas Alpha (Rangkuti, 2004:76). Dengan rumus sebagai berikut:

$$= \alpha \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_j^2}{\sigma_x^2} \right]$$

Dimana :

α = nilai realibilitas alat ukur

k = jumlah item 1 pertanyaan

s_j^2 = Varian belahan j ; $j= 1,2,.....k$

s_x^2 = Varians skor tes

σ_j^2 = jumlah varian masing-masing item

σ_x^2 = varians total

Adapun kriteria pengujiannya adalah apabila nilai reliabilitas instrumen di atas 0,6 atau 60%, berarti terdapat data yang reliabel. Sebaliknya jika nilai reliabilitas kurang dari 0,6 atau 60% berarti tidak terdapat data yang reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, maka dilakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan bantuan program SPSS 16 *for windows*.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini peneliti mendeteksi normalitas data dengan menggunakan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov* yang nantinya akan dipadukan dengan kurva *Normal Q-Q Plots*. Menurut Akbar (2005) *Kolmogorov-Smirnov* adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui

distribusi suatu data untuk data yang minimal bertipe ordinal. Ketentuan pengujian ini adalah jika Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 distribusi adalah normal (Santoso, 2006).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011). Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan menggunakan nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*). Menurut Wijaya (2011) multikolinearitas dapat dilihat dari VIF, jika $VIF < 10$ maka tingkat kolinieritas dapat ditoleransi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Ghozali (2001), menyebutkan ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas: yaitu dengan melihat *Grafik Plot* antara nilai prediksi variabel terikat. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang

jas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi homoskedastisitas.

3. Pengujian Hipotesis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda. Regresi berganda seringkali digunakan untuk mengatasi permasalahan analisis regresi yang melibatkan hubungan dari lebih dari satu variabel bebas (Sugiyono, 2011). Oleh karena itu, model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Penerapan perencanaan pajak

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

X_1 = Kebijakan perpajakan.

X_2 = Undang-Undang perpajakan

X_3 = Administrasi Perpajakan

e = *Error*

Dan untuk interpretasi hasil regresi adalah sebagai berikut :

1. Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Uji-F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang ada di dalam model regresi berganda mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini mempunyai kriteria dalam pengambilan keputusannya yaitu

membandingkan nilai F hasil perhitungan (F_{hitung}) dengan F menurut tabel (F_{tabel}), apabila F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} maka H_0 ditolak dan H_a diterima (Ghazali, 2011).

H_0 : Kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan secara simultan tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu

H_a : Kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap perencanaan pajak pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu

2. Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Uji-t ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini mempunyai kriteria dalam pengambilan keputusannya yaitu membandingkan nilai statistik t dengan statistik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan (t_{hitung}) lebih tinggi nilai t menurut tabel (t_{tabel}), kita menerima hipotesis alternatif (H_a) yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghazali, 2011).

H_0 : Kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu

H_a : Kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap perencanaan pajak

pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghazali, 2011). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu.

$R^2 = 0$ (nol) berarti tidak ada pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

$R^2 =$ mendekati 0 (nol) lemahnya pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

$R^2 =$ mendekati 1 (satu) berarti kuatnya pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu resmi didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Pembentukan KPP Patama Batu adalah bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam peningkatan pelayanan Kepada Wajib Pajak yaitu dengan pembentukan KPP Pratama di seluruh wilayah Kanwil Jawa Timur III pada tanggal 4 Desember 2007. KPP Pratama Batu terletak di Jl. Letjen. S. Parman No.100 Malang, satu gedung dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.

2. Visi, Misi, Janji Dan Motto Pelayanan

a. Visi

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat

b. Misi

Menghimpun dana dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi

c. Janji Pelayanan

Pelayanan prima tekad kami

d. Motto Pelayanan

Efektif, efisien, dan dipercaya

3. Tugas Dan Fungsi**TUGAS**

Melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).

FUNGSI

- a. Pengumpulan dan Pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalan potensi pajak serta ekstensifikasi Wajib Pajak
- b. Penelitian dan Penatausahaan Surat Pemberitahuan masa serta berkas Wajib Pajak
- c. Ektensifikasi dan intensifikasi potensi Wajib Pajak
- d. Pemeliharaan basis data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan
- e. Penatausahaan penerimaan pajak, piutang pajak dan penagihan pajak
- f. Penatausahaan penyelesaian keberatan, banding, restitusi PPh, PPnBM, PTLL, PBB dan BPHTB
- g. Penatausahaan penyelesaian pengurangan PBB
- h. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan

4. Organisasi dan Wilayah Kerja



Wilayah Kerja

Wilayah Kerja KPP Pratama Batu adalah Kota Batu yang meliputi 3 Kecamatan dengan 24 Desa/Kelurahan.

Kota Batu

Luas Wilayah : 19.909,59 ha

Jumlah Penduduk : 208.366

Jumlah WPOP : 16.433

Jumlah WP Badan :

Jumlah SPPT : 94.627

Kecamatan Batu

Luas Wilayah : 4.545,81 ha

Jumlah Penduduk : 101.263

Jumlah WPOP : 9.630

Jumlah WP Badan :

Jumlah SPPT : 35.774

Kecamatan Junrejo

Luas Wilayah : 2.565,02 ha

Jumlah Penduduk : 60.789

Jumlah WPOP : 4.363

Jumlah WP Badan :

Jumlah SPPT : 24.371

Kecamatan Bumiaji

Luas Wilayah : 12.797,89 ha

Jumlah Penduduk : 52.269

Jumlah WPOP : 2.440

Jumlah WP Badan :

Jumlah SPPT : 34.482

Tabel 4.1 Wilayah Kerja KPP Pratama Batu

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Kec. Batu	1. Kel. Sisir 2. Kel. Songgokerto 3. Kel. Ngaglik 4. Kel. Temas 5. Desa Pesanggrahan 6. Desa Oro-oro ombo 7. Desa Sumberejo 8. Desa Sidomulyo
2	Kec. Bumiaji	1. Desa Bulukerto 2. Desa Bumiaji 3. Desa Gunungsari 4. Desa Pandanrejo 5. Desa Giripurno 6. Desa Tulungrejo 7. Desa Sumbergondo 8. Desa Punten 9. Desa Sumberbrantas
3	Kec. Junrejo	1. Desa Torongrejo 2. Desa Mojorejo 3. Desa Junrejo 4. Desa Tlekung 5. Desa Pendem 6. Desa Beji 7. Desa Dadaprejo

3. Sekilas Tentang KPP Pratama Batu

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada pada KPP Batu per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebanyak 66 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 4.2 Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SLTP	2
SMU	12
D1	16
D3	15
S1	15
S2	6

4.3 Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	42
Perempuan	24

4.4 Komposisi pegawai berdasarkan agama

Agama	Jumlah
Islam	60
Kristen Protestan	4
Katholik	2

4.5 Komposisi pegawai berdasarkan umur

Umur (tahun)	Jumlah
Di bawah 21	0
21-25	2
26-30	18
31-35	14
36-40	7
41-45	10
46-50	8
51-55	7
Di atas 55	0

4.6 Komposisi pegawai berdasarkan masa kerja

Masa kerja (tahun)	Jumlah
0-5	6
6-10	18
11-15	14
16-20	12
21-25	5
Di atas 25	11

4. Sarana dan Prasarana

a. Gedung

KPP Pratama Batu berlokasi di sebuah gedung berlantai empat, satu gedung dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III. Gedung ini dibangun mulai tahun 2003 terletak di Jalan Letjen. S. Parman Nomor 100 Malang. KPP Batu menempati lantai dasar, lantai 1 dan sebagian lantai 2. Sedangkan di lantai 4 terdapat Aula Serbaguna dan *Gymnasium* yang dipakai bersama dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Timur III.

b. Komputer Dan Perangkat Lunak

Sarana komputer tersedia di semua seksi. Komputer-komputer tersebut

terhubung dengan jaringan internal Ditjen Pajak yaitu Intranet sehingga proses pengolahan data maupun pertukaran informasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien.

c. TPT (Tempat Pelayanan Terpadu)

TPT merupakan sarana *one stop service* yang memudahkan WP dalam menyelesaikan hak dan kewajiban perpajakannya.

5 Sarana Dan Prasarana Pada TPT

- a. Juara Pertama Turnamen Futsal dalam rangka POR HUT Keuangan RI ke-66 se-Kanwil DJP Jawa Timur III
- b. Juara kedua lomba menghias tumpeng dalam rangka POR HUT Keuangan RI ke-66 se-Kanwil DJP Jawa Timur III
- c. Juara ketiga lomba karaoke dalam rangka POR HUT Keuangan RI ke-66 se-Kanwil DJP Jawa Timur III

Inovasi Dalam Melayani Wajib Pajak

1. Pelayanan

- a. *Drop Box SPT Masa* merupakan media penerimaan SPT Masa PPh, PPn dan Surat-surat lain yang dilakukan secara rutin tiap bulan pada tgl 18-19 yang berlokasi di Alun-alun Batu dan Kantor Pos Batu untuk mempermudah WP dalam penyampaian SPT Masa setiap bulannya.
- b. Pelayanan pemberian NPWP Cabang bagi WP rekanan Pemkot Batu

2. Penyuluhan

Dengan mengadakan Kelas Pajak kepada Wajib Pajak, sosialisasi kepada pedagang bunga/buah/sayur, rumah makan, dan sosialisai kepada bendahrawan SKPD dan bendaharawan sekolah.

3. Pekan Panutan

KPP Pratama Batu ikut aktif dalam kegiatan Pekan Panutan yang diadakan oleh Kanwil DJP Jatim III dalam rangka memberikan teladan kepada Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan di awal tahun. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengundang Walikota Malang, Ketua DPRD, Pejabat Pemda, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

4. Penghargaan Wajib Pajak Patuh

merupakan program stimulasi kepada Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Wajib Pajak Patuh) agar mereka terus mempertahankan prestasi kepatuhan sukarelanya.

6 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

a. Acara Pagi

Acara diselenggarakan setiap hari Senin-Jum'at pkl 07.45 WIB diisi dengan kegiatan sharing, berbagi pengetahuan, game, dan ditutup dengan do'a bersama sehingga menciptakan suasana kekeluargaan dan kondusif antar pegawai.

b. *In House Training (IHT)*

dilaksanakan secara periodik dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis dan pengetahuan karyawan/karyawati KPP Batu.

c. Sistem Penghargaan dan Hukuman(*Reward and Punishment*)

Sistem ini diterapkan kepada seluruh karyawan dan karyawan di lingkungan KPP Batu untuk memberikan motivasi kerja sekaligus sebagai alat monitoring pelaksanaan tugas setiap karyawan/karyawati.

d. Kegiatan kerohanian

merupakan pembinaan mental spritual dengan mengadakan kegiatan rutin mingguan sesuai dengan agama masing-masing.

e. Pakaian Seragam

merupakan salah satu sarana untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekompakan di antara karyawan/karyawati dari berbagai seksi yang ada di KPP Batu.

f. *Value Gathering*

merupakan kegiatan *outbound* bersama seluruh pegawai di luar kantor sebagai sarana *refreshing* di tengah kesibukan bekerja.

7 Aplikasi

a. *MPN Cooker*

MPN COOKER adalah aplikasi yang dibuat oleh KPP Pratama Batu untuk memberikan keseluruhan informasi mengenai Wajib Pajak yang berisi statistik Wajib Pajak per kewajiban, per subyek dan juga WP Besar KPP Pratama Batu. MPN Cooker juga berisi Rencana

Penerimaan KPP Pratama Batu hingga Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Batu. MPN Cooker mempunyai peran penting karena mengolah data MPN (Modul Penerimaan Negara) dan menyajikan data tersebut dengan jelas sehingga dapat dengan mudah dibaca dan dimanfaatkan oleh para pegawai KPP Pratama Batu khususnya para *Account Representative*.

b. Barcode

Pada KPP Pratama Batu tersedia Sistem Informasi Arsip yang biasa dikenal dengan proses pemberkasan yang dilakukan dengan menggunakan Sistem *Barcode*. Sistem ini dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan untuk kebutuhan internal maupun eksternal kantor, dalam hal memberikan pelayanan peminjaman dan pengadministrasian berkas.

8 Motivasi Kepada Pegawai dan WP

Kata-kata/kalimat-kalimat motivasi yang terpasang diberbagai penjuru ruangan

9 Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Perpusatakaan Umum disediakan berbagai macam buku sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan pegawai, Wajib Pajak, atau tamu yang berkunjung.

10 Kepedulian Sosial

Dilakukan dengan memberikan santunan kepedulian karyawan/karyawati KPP Batu, perayaan hari-hari besar keagamaan dengan menyantuni

masyarakat sekitar kantor seperti pemotongan hewan qurban, bakti sosial, kepedulian untuk korban bencana alam.

B. Gambaran Umum Responden

Gambaran karakteristik responden diperoleh berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang diberikan secara langsung kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batu. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik dan staff badan usaha yang memiliki kewenangan dalam memberikan informasi terkait dengan kebijakan perencanaan pajak sehingga dapat diperoleh suatu informasi secara jelas dan akurat sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan. Dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden, maka dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin Responden

Mengenai perbandingan jumlah jenis kelamin para responden yaitu para wajib pajak yang terdapat di KPP Pratama Batu, secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	%
Laki-laki	73	73%
Perempuan	27	27%
Jumlah	100	100

Sumber: Data primer diolah

Berdasar tabel 4.7, dari 100 responden yaitu wajib pajak yang terdapat di KPP Pratama Batu yang paling banyak adalah laki-laki yaitu sebesar 73 responden atau 73% dan 27 responden atau 27% adalah perempuan. Hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa kelompok responden laki-laki merupakan kelompok responden yang memiliki kewajiban perpajakan atas badan usaha yang dimiliki.

2. Tingkat Usia Responden

Gambaran mengenai tingkat usia responden yaitu wajib pajak yang terdapat di KPP Pratama Batu, secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8

Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	%
< 25 tahun	1	1%
25 – 40 tahun	52	52%
41– 55 tahun	35	35%
> 55 tahun	12	12%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 4.8, dari 100 responden dapat diketahui bahwa usia 25 – 40 tahun merupakan usia wajib pajak badan yang terdapat di KPP Pratama Batu yaitu sebanyak 52 responden atau 52%. Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa kelompok usia tersebut merupakan kelompok usia pemilik usaha tetap sehingga memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.

3. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki oleh responden yaitu wajib pajak badan yang terdapat di KPP Pratama Batu dan jumlah pada masing-masing tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.9 di bawah:

Tabel 4.9

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	%
SMA	16	16%
DIII	9	9%
S1	63	63%
S2	12	12%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer Diolah

Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan yaitu tamatan Sarjana (S1) yaitu sebanyak 63 responden atau 63%. Tingkat pendidikan tersebut secara langsung berperan dalam proses berfikir dalam hal ini mempengaruhi tingkat kesadaran dalam proses pembayaran pajak yang dilakukan.

C. Diskripsi Jawaban Responden

Jawaban responden dapat menggambarkan tanggapan responden atas kuesioner yang telah diberikan kepada responden yaitu wajib pajak yang terdapat di KPP Pratama Batu. Untuk mengetahui jawaban responden tersebut secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pajak (Y)

Tabel 4.10

Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel Perencanaan Pajak (Y)

Item	Jawaban Responden										Skor Rata-Rata
	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%	
Y _{1.1}	8	8%	62	62%	30	30%	0	0	0	0	3,78
Y _{1.2}	4	4%	59	59%	37	37%	0	0	0	0	3,67
Y _{1.3}	10	10%	51	51%	39	39%	0	0	0	0	3,71
Y _{1.4}	8	8%	56	56%	36	36%	0	0	0	0	3,72
Y _{1.5}	6	6%	53	53%	41	41%	0	0	0	0	3,65
Y _{1.6}	6	6%	50	50%	44	44%	0	0	0	0	3,62
Rata-Rata											3,69

Sumber : Data primer diolah

Keterangan:

1. Memilih sistem yang tepat dalam melakukan pembayaran pajak (Y_{1.1})
2. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan sehingga terhindar dari denda (Y_{1.2}).
3. Melakukan penundaan membayar pajak dengan harapan memiliki kesempatan untuk membayar pajak dengan lebih rendah (Y_{1.3})
4. Penetapan waktu yang tepat dalam melakukan pembayaran pajak (Y_{1.4}).
5. Melakukan rekapitulasi dalam proses pembayaran pajak (Y_{1.5})
6. Melakukan pemisahan pendapatan secara tepat ketika melakukan pembayaran pajak (Y_{1.6}).

Mengenai tanggapan responden atas pernyataan mengenai memilih sistem yang tepat dalam melakukan pembayaran pajak. Tabel 4.10 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang (8%), sebanyak 62 orang atau 62 % menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 30 (30%) responden dengan skor rata-rata sebesar 3,78. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju memilih sistem yang tepat dalam melakukan pembayaran pajak.

Tanggapan responden atas pernyataan bahwa membayar pajak sesuai dengan ketentuan sehingga terhindar dari denda. Tabel 4.10 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang (4%), sebanyak 59 orang atau 59% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 37 (37%) responden dengan skor rata-rata sebesar 3,67. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju membayar pajak sesuai dengan ketentuan sehingga terhindar dari denda.

Mengenai tanggapan responden atas pernyataan mengenai melakukan penundaan membayar pajak dengan harapan memiliki kesempatan untuk membayar pajak dengan lebih rendah. Tabel 4.10 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 10 orang (10%), sebanyak 51 orang atau 51 % menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 39 (39%) responden dengan skor rata-rata sebesar 3,71. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju melakukan penundaan membayar pajak dengan harapan memiliki kesempatan untuk membayar pajak dengan lebih rendah.

Tanggapan responden atas pernyataan bahwa penetapan waktu yang tepat dalam melakukan pembayaran pajak. Tabel 4.10 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang (8%), sebanyak 56 orang atau 56% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 36 (36%) responden dengan skor rata-rata sebesar 3,72.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju penetapan waktu yang tepat dalam melakukan pembayaran pajak.

Tanggapan responden atas pernyataan bahwa melakukan rekapitulasi dalam proses pembayaran pajak. Tabel 4.10 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang (6%), sebanyak 53 orang atau 53% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 41 (41%) responden dengan skor rata-rata sebesar 3,65. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju melakukan rekapitulasi dalam proses pembayaran pajak.

Mengenai tanggapan responden atas pernyataan mengenai melakukan pemisahan pendapatan secara tepat ketika melakukan pembayaran pajak. Tabel 4.10 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang (6%), sebanyak 50 orang atau 50 % menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 44 (44%) responden dengan skor rata-rata sebesar 3,62. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa melakukan pemisahan pendapatan secara tepat ketika melakukan pembayaran pajak.

Hasil analisis rata-rata mengenai variabel kebijakan perpajakan diperoleh skor rata-rata sebesar 3,69, yang dapat diartikan bahwa selama ini wajib pajak merasakan bahwa telah memilih sistem yang tepat dalam

melakukan pembayaran pajak, membayar pajak sesuai dengan ketentuan sehingga terhindar dari denda, melakukan penundaan membayar pajak dengan harapan memiliki kesempatan untuk membayar pajak dengan lebih rendah, penetapan waktu yang tepat dalam melakukan pembayaran pajak, melakukan rekapitulasi dalam proses pembayaran pajak dan melakukan pemisahan pendapatan secara tepat ketika melakukan pembayaran pajak.

2. Kebijakan Perpajakan (X_1)

Tabel 4.11
Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel Kebijakan
Perpajakan (X_1)

Item	Jawaban Responden										Skor Rata-Rata
	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%	
$X_{1.1}$	5	5%	71	71%	24	24%	0	0	0	0	3,81
$X_{1.2}$	9	9%	68	68%	23	23%	0	0	0	0	3,86
$X_{1.3}$	9	9%	63	63%	28	28%	0	0	0	0	3,81
$X_{1.4}$	12	12%	70	70%	18	18%	0	0	0	0	3,94
$X_{1.5}$	12	12%	68	68%	20	20%	0	0	0	0	3,92
$X_{1.6}$	8	8%	68	68%	24	24%	0	0	0	0	3,84
Rata-Rata											3,86

Sumber : Data primer diolah

Keterangan:

1. Sistem pemungutan pajak tepat ($X_{1.1}$)
2. Sistem pemungutan pajak mudah ($X_{1.2}$).
3. Nilai pajak dengan jumlah pajak yang harus dibayar Wajib Pajak sesuai ($X_{1.3}$).
4. Nilai pajak menggunakan perhitungan secara jelas ($X_{1.4}$).
5. Penetapan wajib pajak tepat ($X_{1.5}$).
6. Subyek pajak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan ($X_{1.6}$).

Tanggapan responden atas pernyataan mengenai sistem pemungutan pajak tepat dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 5 orang (5%), sebanyak 71 orang atau 71% menyatakan setuju dan

responden yang menyatakan netral sebanyak 24 (24%) responden dengan skor rata-rata sebesar 3,81. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju sistem pemungutan pajak tepat.

Responden memberikan tanggapan mengenai sistem pemungutan pajak mudah. Tabel 4.11 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 9 orang (9%), sebanyak 68 orang atau 68% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 23 (23%) responden dengan skor rata-rata sebesar 3,86. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju sistem pemungutan pajak mudah.

Tanggapan responden atas pernyataan mengenai nilai pajak dengan jumlah pajak yang harus dibayar Wajib Pajak sesuai pada Tabel 4.11 menunjukkan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 9 orang (9%), sebanyak 63 orang atau 63% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 28 (28%) responden dengan skor rata-rata sebesar 3,81. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa nilai pajak dengan jumlah pajak yang harus dibayar Wajib Pajak sesuai.

Responden memberikan tanggapan atas pernyataan mengenai nilai pajak menggunakan perhitungan secara jelas. Tabel 4.11 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 12 orang (12%), sebanyak 70 orang atau 70% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 18 (18%) responden dengan skor rata-rata sebesar 3,94. Hasil

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju nilai pajak menggunakan perhitungan secara jelas.

Tanggapan responden atas pernyataan mengenai penetapan wajib pajak tepat. Tabel 4.11 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 12 orang (12%), sebanyak 68 orang atau 68% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 20 (20%) responden dengan skor rata-rata sebesar 3,92. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju penetapan wajib pajak tepat.

Adapun tanggapan responden atas pernyataan mengenai subyek pajak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Tabel 4.11 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang (8%), sebanyak 68 orang atau 68% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 24 (24%) responden dengan skor rata-rata sebesar 3,84. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju subyek pajak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Hasil analisis rata-rata mengenai variabel kebijakan perpajakan diperoleh skor rata-rata sebesar 3,86, yang dapat diartikan bahwa selama ini wajib pajak memberikan penilaian yang baik mengenai ketepatan sistem pemungutan pajak, kemudahan sistem pemungutan pajak, kesesuaian nilai pajak dengan jumlah pajak yang harus dibayar, nilai pajak menggunakan perhitungan secara jelas, penetapan wajib pajak tepat dan subyek pajak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

3. Undang-Undang Perpajakan (X_2)

Tabel 4.12
Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel Undang-Undang
Perpajakan (X_2)

Item	Jawaban Responden										Skor Rata- Rata
	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%	
$X_{2.1}$	12	12%	60	60%	28	28%	0	0	0	0	3,84
$X_{2.2}$	8	8%	64	64%	28	28%	0	0	0	0	3,80
$X_{2.3}$	4	4%	69	69%	27	27%	0	0	0	0	3,77
$X_{2.4}$	8	8%	66	66%	26	26%	0	0	0	0	3,82
$X_{2.5}$	8	8%	70	70%	22	22%	0	0	0	0	3,86
Rata-Rata											3,82

Sumber : Data primer diolah

Keterangan:

1. Penetapan PPh final jelas ($X_{2.1}$)
2. PPh final memiliki kepastian sesuai dengan kewajiban perpajakan ($X_{2.2}$)
3. Penetapan penghasilan kena pajak tepat ($X_{2.3}$)
4. Perhitungan pajak penghasilan tepat ($X_{2.4}$)
5. Besarnya pajak sesuai dengan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak ($X_{2.5}$)

Tanggapan responden atas pernyataan mengenai penetapan PPh final jelas. Tabel 4.12 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 12 orang (12%), sebanyak 60 orang atau 60% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 28 (28%) responden dengan skor rata-rata sebesar 3,84. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju penetapan PPh final jelas.

Responden memberikan tanggapan atas pernyataan mengenai PPh final memiliki kepastian sesuai dengan kewajiban perpajakan. Tabel 4.12 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 8

orang (8%), sebanyak 64 orang atau 64% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 28 (28%) responden dengan skor rata-rata sebesar 3,80. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju PPh final memiliki kepastian sesuai dengan kewajiban perpajakan.

Tanggapan responden atas pernyataan mengenai penetapan penghasilan kena pajak tepat. Tabel 4.12 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang (4%), sebanyak 69 orang atau 69% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 27 (27%) responden dengan skor rata-rata sebesar 3,77. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju penetapan penghasilan kena pajak tepat.

Responden memberikan tanggapan atas pernyataan mengenai perhitungan pajak penghasilan tepat. Tabel 4.12 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang (8%), sebanyak 66 orang atau 66% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 26 (26%) responden dengan skor rata-rata sebesar 3,82. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju perhitungan pajak penghasilan tepat.

Mengenai tanggapan responden atas pernyataan mengenai besarnya pajak sesuai dengan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Tabel 4.12 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang (8%), sebanyak 70 orang atau 70% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 22 (22%) responden dengan skor rata-rata

sebesar 3,86. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju besarnya pajak sesuai dengan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak.

Hasil analisis rata-rata mengenai variabel kebijakan perpajakan diperoleh skor rata-rata sebesar 3,82, yang dapat diartikan bahwa selama ini wajib pajak memberikan penilaian yang baik mengenai penetapan PPh final jelas, PPh final memiliki kepastian sesuai dengan kewajiban perpajakan, penetapan penghasilan kena pajak tepat, perhitungan pajak penghasilan tepat dan besarnya pajak sesuai dengan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak.

4. Administrasi Perpajakan (X₃)

Tabel 4.13
Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel Administrasi
Perpajakan (X₃)

Item	Jawaban Responden										Skor Rata-Rata
	SS	%	S	%	N	%	TS	%	STS	%	
X _{3.1}	8	8%	68	68%	24	24%	0	0	0	0	3,84
X _{3.2}	20	20%	64	64%	16	16%	0	0	0	0	4,04
X _{3.3}	5	5%	62	62%	33	33%	0	0	0	0	3,72
X _{3.4}	7	7%	65	65%	28	28%	0	0	0	0	3,79
X _{3.5}	8	8%	68	68%	24	24%	0	0	0	0	3,84
X _{3.6}	4	4%	63	63%	33	33%	1	1%	0	0	3,69
Rata-Rata											3,82

Sumber : Data primer diolah

Keterangan:

1. Penentuan jumlah pajak tepat (X_{3.1})
2. Perhitungan pajak dilakukan secara cermat (X_{3.2})
3. Penetapan batas waktu pembayaran pajak tepat (X_{3.3})
4. Penetapan sanksi bagi WP yang melanggar waktu pembayaran pajak (X_{3.4})
5. Pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan (X_{3.5})

6. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (X_{3.6})

Tanggapan responden atas pernyataan mengenai penentuan jumlah pajak tepat. Tabel 4.13 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang (8%), sebanyak 68 orang atau 68% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 24 (24%) responden dengan skor rata-rata sebesar 3,84. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju penentuan jumlah pajak tepat.

Responden memberikan tanggapan responden atas pernyataan mengenai perhitungan pajak dilakukan secara cermat. Tabel 4.13 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 20 orang (20%), sebanyak 64 orang atau 64% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 16 (16%) responden dengan skor rata-rata sebesar 4,04. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju perhitungan pajak dilakukan secara cermat.

Mengenai tanggapan responden atas pernyataan mengenai penetapan batas waktu pembayaran pajak tepat. Tabel 4.13 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 5 orang (5%), sebanyak 62 orang atau 62% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 33 (33%) responden dengan skor rata-rata sebesar 3,72. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa penetapan batas waktu pembayaran pajak tepat.

Tanggapan responden atas pernyataan mengenai penetapan sanksi bagi WP yang melangar waktu pembayaran pajak. Tabel 4.13 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 7 orang (7%), sebanyak 65 orang atau 65% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 28 (28%) responden dengan skor rata-rata sebesar 3,79. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju penetapan sanksi bagi WP yang melangar waktu pembayaran pajak.

Tanggapan responden atas pernyataan mengenai pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan. Tabel 4.13 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang (8%), sebanyak 68 orang atau 68% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 24 (24%) responden dengan skor rata-rata sebesar 3,84. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan.

Responden memberikan tanggapan atas pernyataan mengenai membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tabel 4.13 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang (4%), sebanyak 62 orang atau 62% menyatakan setuju dan responden yang menyatakan netral sebanyak 33 (33%) responden serta sebanyak 1 responden atau 1% menyatakan tidak setuju dengan skor rata-rata sebesar 3,69. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil analisis rata-rata mengenai variabel kebijakan perpajakan diperoleh skor rata-rata sebesar 3,82, yang dapat diartikan bahwa selama ini wajib pajak merasakan bahwa penentuan jumlah pajak tepat, perhitungan pajak dilakukan secara cermat, penetapan batas waktu pembayaran pajak tepat, penetapan sanksi bagi WP yang melanggar waktu pembayaran pajak, pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk melihat valid tidaknya masing-masing instrumen dalam variabel kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan dan perencanaan pajak perusahaan di KPP Pratama Batu. Nilai dari pengujian ini adalah 0,195 dengan $DF = n-1$ taraf signifikan 0,05 (5%). Instrumen dikatakan valid jika angka koefisien korelasi yang diperoleh lebih besar dari nilai kritik r . Adapun hasil uji validitas pada pengujian ini untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14

Uji Validitas Variabel Kebijakan Perpajakan (X_1)

Variabel	Item	Koefisien Korelasi	r Tabel	Keterangan
Kebijakan Perpajakan	X _{1.1}	0,590	0,195	Valid
	X _{1.2}	0,525	0,195	Valid
	X _{1.3}	0,667	0,195	Valid
	X _{1.4}	0,610	0,195	Valid
	X _{1.5}	0,559	0,195	Valid
	X _{1.6}	0,581	0,195	Valid

Sumber: Data Primer Diolah

Dari Tabel 4.14, dapat disimpulkan bahwa semua instrumen variabel Kebijakan perpajakan adalah valid, karena terbukti bahwa nilai koefisien lebih besar dari nilai kritik atau Tabel pada tingkat signifikan 5%. Adapun untuk mengetahui uji validitas variabel undang-undang perpajakan (X_2) dapat dilihat pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15

Uji Validitas Variabel Undang-undang Perpajakan (X_2)

Variabel	Item	Koefisien Korelasi	r Tabel	Keterangan
Undang-undang Perpajakan	X2.1	0,508	0,195	Valid
	X2.2	0,503	0,195	Valid
	X2.3	0,536	0,195	Valid
	X2.4	0,484	0,195	Valid
	X2.5	0,433	0,195	Valid

Sumber: Data Primer Diolah

Dari Tabel 4.15, dapat disimpulkan bahwa semua instrumen variabel undang-undang perpajakan adalah valid, karena terbukti bahwa nilai koefisien lebih besar dari nilai kritik atau Tabel pada tingkat signifikan 5%. Adapun hasil uji validitas pada pengujian ini untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16

Uji Validitas Variabel Tentang Administrasi Perpajakan (X_3)

Variabel	Item	Koefisien Korelasi	r Tabel	Keterangan
Administrasi Perpajakan	X3.1	0,557	0,195	Valid
	X3.2	0,541	0,195	Valid
	X3.3	0,421	0,195	Valid
	X3.4	0,553	0,195	Valid
	X3.5	0,480	0,195	Valid
	X3.6	0,452	0,195	Valid

Sumber: Data Primer Diolah

Dari Tabel 4.16, dapat disimpulkan bahwa semua instrumen variabel administrasi perpajakan adalah valid, karena terbukti bahwa nilai koefisien lebih besar dari nilai kritik atau Tabel pada tingkat signifikan 5%. Adapun untuk mengetahui uji validitas variabel perencanaan pajak di KPP Pratama Batu (Y) dapat dilihat pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17
Uji Validitas Variabel Perencanaan Pajak di KPP Batu (Y)

Variabel	Item	Koefisien Korelasi	r Tabel	Keterangan
Perencanaan Perpajakan	Y _{1.1}	0,309	0,195	Valid
	Y _{1.2}	0,545	0,195	Valid
	Y _{1.3}	0,638	0,195	Valid
	Y _{1.4}	0,568	0,195	Valid
	Y _{1.5}	0,400	0,195	Valid
	Y _{1.6}	0,410	0,195	Valid

Sumber: Data Primer Diolah

Dari Tabel 4.17, dapat disimpulkan bahwa semua instrumen variabel perencanaan pajak di KPP Batu (Y) adalah valid, karena terbukti bahwa nilai koefisien lebih besar dari nilai kritik atau Tabel pada tingkat signifikan 5%.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau dihandalkan. Untuk melihat reabel atau tidak, dilakukan dengan melihat koefisien reliabilitas (*coefisient of reliability*). Nilai koefisien tersebut berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 menunjukkan makin reliabel. Ukuran yang dipakai untuk semakin reliabel bilamana *Cronbach's Alpha* diatas 0,6. Adapun hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.18 di bawah:

Tabel 4.18

Hasil Uji Reliabilitas

Item	Koefisien Reliabilitas	Hasil Uji
Kebijakan Perpajakan	0,735	Reliabel
Undang-undang Perpajakan	0,652	Reliabel
Administrasi Perpajakan	0,681	Reliabel
Perencanaan Perpajakan	0,664	Reliabel

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan hasil uji reliabilitas maka dapat dikatakan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel, hal tersebut dikarenakan koefisien *Cronbach's Alpha* diatas 0,6.

E. Hasil Analisis Data

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk membuktikan apakah model regresi linier berganda yang dipergunakan dalam penelitian memiliki persamaan yang tidak bias yang terbaik (*Best Linier Unbias Estimator/BBLUE*), maka selanjutnya akan dilakukan evaluasi ekonometrika. Evaluasi ekonometrika terdiri dari uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Namun dalam penelitian ini tidak menggunakan uji autokorelasi karena data yang digunakan bukan merupakan data *time series* atau waktu berkala.

a. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas menunjukkan adanya lebih dari satu hubungan linier yang sempurna. Hal tersebut seperti yang telah dikemukakan oleh Santoso (2002:203) bahwa tujuan uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel *independent*. Jika

terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dari besarnya VIF (*Variance Inflating Factor*) dan *tolerance*. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas menurut Santoso (2002:206) adalah:

- a. Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1
- b. Mempunyai angka *tolerance* mendekati 1

Berikut ini akan disajikan hasil pengujian multikolinearitas yang dilakukan dengan bantuan SPSS *for windows*, secara lengkap hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19
Hasil Pengujian Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1,713	1,545		1,109	,270		
Kebijakan Perpajakan	,197	,056	,247	3,534	,001	,975	1,033
Undang-Undang Perpajakan	,212	,063	,233	3,361	,001	,977	1,030
Administrasi Perpajakan	,541	,074	,520	7,323	,000	,973	1,004

a. Dependent Variable: Perencanaan Perpajakan

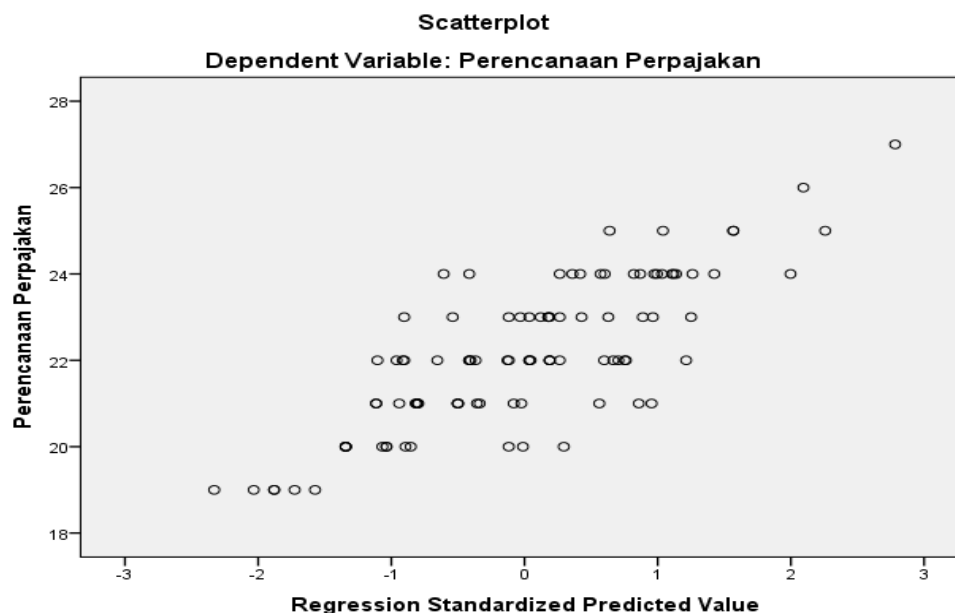
Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas dapat diketahui bahwa nilai VIF masing-masing variabel bebas di sekitar angka satu dan nilai *tolerance* mendekati angka 1. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas multikolinearitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu

pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas. Jika varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Santoso, 2002:208). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi bisa dilihat dari pola yang terbentuk pada titik-titik yang terdapat pada grafik *scatterplot*. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat disajikan pada grafik berikut:



Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa titik-titik yang terbentuk pada grafik *scatterplot* tidak membentuk pola yang jelas serta tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan bebas heteroskedastisitas.

c. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan metode uji sampel *Kolmogorov-Smirnov* dengan *test distribution normal* dimana kriteria yang digunakan yaitu: jika $\text{Sig} > \text{taraf signifikansi } (\alpha = 0,05)$ maka data

penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hasil uji normalitas data dapat disajikan pada Tabel 4.20

Tabel 4.20
Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,01806654
Most Extreme Differences	Absolute	,049
	Positive	,033
	Negative	-,049
Kolmogorov-Smirnov Z		,493
Asymp. Sig. (2-tailed)		,968

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan hasil uji normalitas data dapat diperoleh nilai sig. lebih besar dari 0,05, berdasarkan hasil tersebut maka data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam bagian ini disajikan hasil statistik mengenai pengaruh variabel kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan terhadap perencanaan pajak perusahaan di KPP Pratama Batu dengan hasil penelitian yang telah diolah komputer melalui program SPSS dengan analisis regresi linier berganda (*multiple regression*).

Tabel 4.21
Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1,713	1,545		1,109	,270		
Kebijakan Perpajakan	,197	,056	,247	3,534	,001	,975	1,033
Undang-Undang Perpajakan	,212	,063	,233	3,361	,001	,977	1,030
Administrasi Perpajakan	,541	,074	,520	7,323	,000	,973	1,004

a. Dependent Variable: Perencanaan Perpajakan

Sumber: Data primer diolah

Perhitungan regresi linier berganda untuk memprediksi besarnya variabel terikat terhadap variabel bebas. Persamaan regresi yang digunakan yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Berdasarkan hasil analisis regresi, maka dapat dirumuskan suatu persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 1,713 + 0,197X_1 + 0,212X_2 + 0,541X_3$$

Dari Tabel 4.14, maka secara parsial masing-masing variabel bebas berpengaruh terhadap perencanaan pajak perusahaan (pada KPP Pratama Batu) (Y). Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kebijakan perpajakan (X_1) berpengaruh positif, dengan nilai $b=0,197$ dengan signifikansi ($\alpha < 0,01$) yang berarti bahwa variabel kebijakan perpajakan (X_1) berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak perusahaan di KPP Pratama Batu. Hasil analisis menunjukkan

bahwa variabel undang-undang perpajakan (X_2) berpengaruh positif terhadap perencanaan perpajakan (Pada KPP Pratama Batu) dapat diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel administrasi perpajakan (X_3) berpengaruh positif, dengan nilai $b=0,541$ dengan signifikansi ($\alpha < 0,00$) yang berarti bahwa variabel administrasi perpajakan (X_3) berpengaruh positif terhadap perencanaan perpajakan dapat diterima.

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent* adalah besar, hal tersebut dapat dilihat pada nilai Adj. R. Square (R^2) yaitu sebesar 0,636. Hasil Uji hipotesis IV dapat ditunjukkan dari tabel koefisien determinasi berikut:

Tabel 4.22

Nilai koefisien determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,804 ^a	,647	,636	1,034	1,873

a. Predictors: (Constant), Administrasi Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, Kebijakan Perpajakan

b. Dependent Variable: Perencanaan Perpajakan

Dengan demikian berarti bahwa model regresi yang digunakan mampu menjelaskan pengaruh variabel kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan terhadap perencanaan pajak (pada KPP Pratama Batu) sebesar 63,6%, sedangkan sisanya sebesar 36,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dari masing-masing variabel

kebijakan perpajakan (X_1), undang-undang perpajakan (X_2), administrasi perpajakan (X_3) hasilnya menunjukkan bahwa adanya korelasi berganda (R) sebesar 0,804. Angka tersebut menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel bebas terhadap variabel terkait.

3. Pengujian Hipotesis

a. Analisis Uji F

Hasil pengujian hipotesis penelitian dengan menggunakan uji F dapat disajikan pada tabel 4.23 berikut:

Tabel 4.23

Hasil Uji ANOVA

ANOVA^a

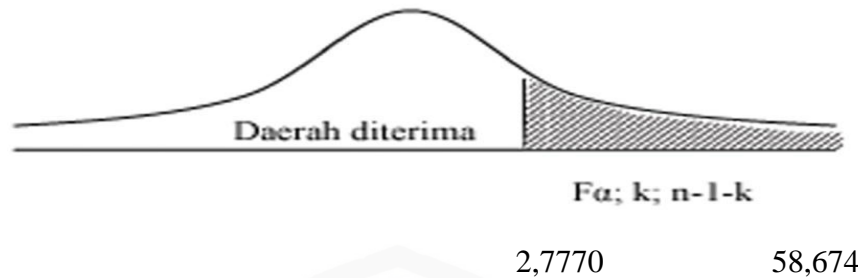
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	188,141	3	62,714	58,674	,000 ^b
	Residual	102,609	96	1,069		
	Total	290,750	99			

a. Dependent Variable: Perencanaan Perpajakan

b. Predictors: (Constant), Administrasi Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, Kebijakan Perpajakan

Berdasarkan tabel 4.23 dapat diketahui nilai F hitung sebesar 58,674 dengan signifikansi ($\alpha < 0,00$) yang berarti bahwa secara bersama-sama variabel kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan berpengaruh terhadap perencanaan pajak perusahaan (pada KPP Pratama Batu) (Y). Untuk lebih jelasnya hasil uji F dapat dilihat pada Gambar 4.1 di bawah :

Gambar 4.1 : **Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji Secara Simultan (Uji F)**



Sumber : Data Diolah (Lampiran)

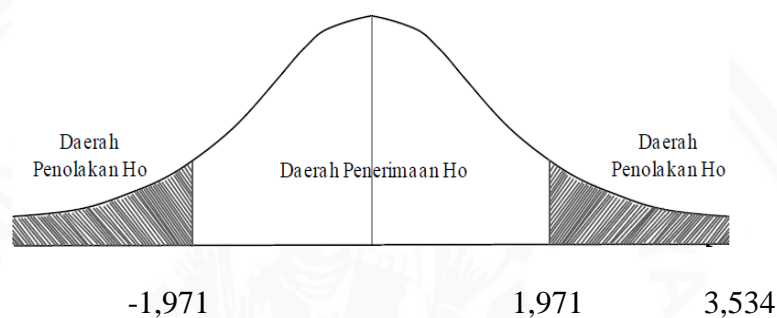
b. Analisis Uji t

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan dan kemudian diolah komputer melalui program SPSS (*Statistical Product Service and Service Solutions*) released 21,00 maka dapat diketahui hasil analisis regresi linier berganda (*multiple regression*), untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel *independent*, yaitu kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan berpengaruh terhadap perencanaan pajak, maka digunakan uji *t* (*t*- test) dua arah (*two side* atau *2 – tail test*) dengan cara membandingkan nilai signifikansinya dengan α , dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) sebesar 95% ($\alpha = 5\%$). Alasan penggunaan uji *two side* atau *2 – tail test* karena nilai *t* hitung memiliki kemungkinan nilai positif dan negatif sehingga digunakan uji 2 sisi. Berdasarkan uji *t* secara statistik analisis regresi secara parsial dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh kebijakan perpajakan terhadap perencanaan pajak

Dari hasil analisis diperoleh tingkat signifikansi variabel kebijakan perpajakan (X_1) yaitu sebesar $0,001 < \alpha$, (5%) hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan variabel kebijakan perpajakan (X_1) terhadap perencanaan pajak dan dapat digambarkan kurva uji t sebagai berikut:

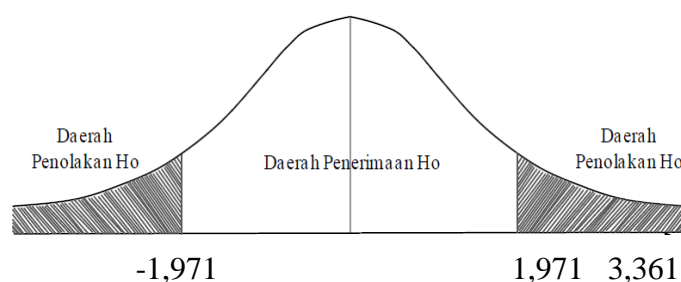
Gambar 4.1 : Pengaruh kebijakan perpajakan terhadap perencanaan pajak



2. Pengaruh undang-undang perpajakan terhadap perencanaan pajak

Dari hasil analisis diperoleh tingkat signifikansi variabel undang-undang perpajakan (X_2) yaitu sebesar $0,001 < \alpha$, (5%) hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan variabel undang-undang perpajakan (X_2) terhadap perencanaan pajak dan dapat digambarkan kurva uji t sebagai berikut:

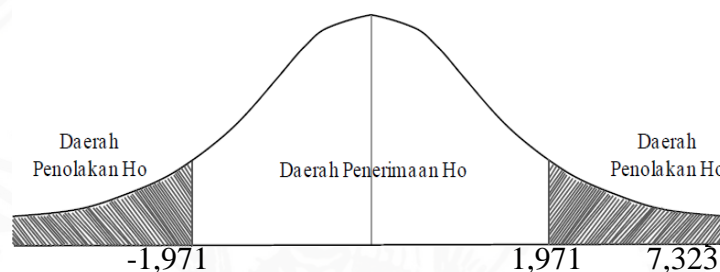
Gambar 4.2 : Pengaruh undang-undang perpajakan terhadap perencanaan pajak



3. Pengaruh administrasi perpajakan terhadap perencanaan pajak

Dari hasil analisis diperoleh tingkat signifikansi variabel administrasi perpajakan (X_3) yaitu sebesar $0,000 < \alpha$, (5%) hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan variable administrasi perpajakan (X_3) terhadap perencanaan pajak dan dapat digambarkan kurva uji t sebagai berikut:

Gambar 4.3 : Pengaruh administrasi perpajakan terhadap perencanaan pajak



Adapun untuk mengetahui variabel yang berpengaruh terhadap perencanaan pajak yaitu dengan membandingkan nilai koefisien regresi masing-masing variabel. Berdasarkan hasil perbandingan koefisien regresi maka administrasi perpajakan memiliki pengaruh dominan terhadap perencanaan pajak.

F. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil analisis kebijakan perpajakan dapat diketahui bahwa wajib pajak memberikan penilaian yang baik mengenai ketepatan sistem pemungutan pajak, kemudahan sistem pemungutan pajak, kesesuaian nilai pajak dengan jumlah pajak yang harus dibayar, nilai pajak menggunakan perhitungan secara jelas, penetapan wajib pajak tepat dan subyek pajak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kebijakan perpajakan menunjukkan bahwa diartikan

bahwa selama ini wajib pajak memberikan penilaian yang baik mengenai penetapan PPh final jelas, PPh final memiliki kepastian sesuai dengan kewajiban perpajakan, penetapan penghasilan kena pajak tepat, perhitungan pajak penghasilan tepat dan besarnya pajak sesuai dengan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Kebijakan ini memberikan dampak terhadap upaya upaya wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, bentuk kebijakan tersebut yaitu perhitungan kesesuaian Tarif Pajak PPh Badan digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang bagi Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan dari Objek Pajak Non Final berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh. Tarif Pajak PPh Badan dari penghasilan Non Final adalah berdasarkan Pasal 17 dan 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh. Tarif Pajak adalah sebesar 25 % dari Penghasilan Kena Pajak.

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Kebijakan perpajakan menunjukkan bahwa wajib pajak merasakan penentuan jumlah pajak tepat, perhitungan pajak dilakukan secara cermat, penetapan batas waktu pembayaran pajak tepat, penetapan sanksi bagi WP yang melanggar waktu pembayaran pajak, pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Kebijakan perpajakan menunjukkan bahwa selama ini wajib pajak merasakan telah memilih sistem yang tepat dalam melakukan pembayaran pajak, membayar pajak sesuai dengan ketentuan sehingga terhindar dari denda, melakukan penundaan membayar pajak dengan harapan memiliki kesempatan untuk membayar pajak dengan lebih rendah, penetapan waktu yang tepat dalam melakukan pembayaran pajak, melakukan rekapitulasi dalam proses pembayaran pajak dan melakukan pemisahan pendapatan secara tepat ketika melakukan pembayaran pajak.

Secara umum ada tiga kelompok kewajiban pajak yang wajib dilaksanakan oleh setiap Wajib Pajak, yaitu: Kewajiban pajak sendiri (seperti PPh Pasal 25/29); Kewajiban memotong atau memungut (pot/put) pajak atas penghasilan orang lain (misalnya: PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Final); dan Kewajiban memungut PPN dan atau PPn BM (jika ada) yang khusus berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban pajak menurut undang-undang tersebut memberikan kemudahan atau fasilitas dalam upaya pemenuhan kewajiban perpajakan. Kewajiban Wajib Pajak Badan umumnya meliputi seluruh jenis pajak, baik atas pajak sendiri, pemotongan/pemungutan pajak atas penghasilan pihak lain, maupun pemungutan PPN dan atau PPnBM (jika ada), tergantung dari bentuk badan, jenis usaha yang dilakukan, serta status Wajib Pajak yang bersangkutan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kebijakan perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan perpajakan, hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin tepatnya kebijakan perpajakan maka dapat memberikan dukungan dalam upaya untuk melakukan perencanaan pajak. Menurut pendapat Mansury (2005) bahwa pengertian kebijakan pajak adalah merupakan bentuk pengalihan sumber daya dari sektor swasta kepada sektor publik (negara), karena penduduk yang bersangkutan mempunyai kemampuan secara ekonomis yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan tanpa mendapat imbalan yang langsung ditunjuk dalam rangka memenuhi tujuan ekonomi sosial negaranya. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh undang-undang perpajakan terhadap perencanaan perpajakan. Adanya pengaruh tersebut dapat diartikan bahwa dengan semakin tepatnya undang-undang perpajakan maka perencanaan perpajakan akan mengalami peningkatan.

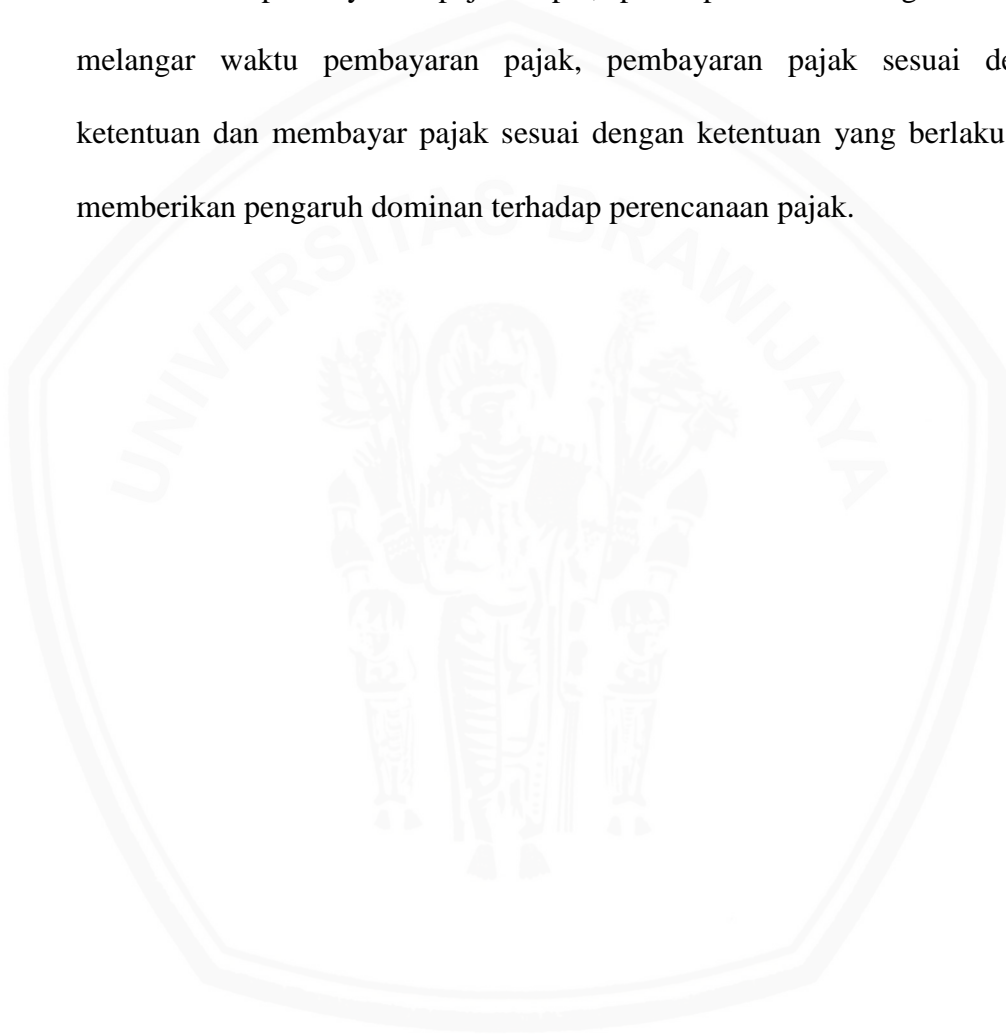
Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan penetapan undang-undang yang mengatur setiap permasalahan perpajakan (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak) sehingga upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki wajib pajak dapat mendukung dalam upaya meningkatkan perencanaan perpajakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan perpajakan akan mengalami peningkatan. Adanya pengaruh yang signifikan menunjukkan

bahwa dengan semakin tepatnya administrasi perpajakan maka dapat memberikan dukungan dalam upaya untuk melakukan perencanaan pajak.

Hasil analisis menunjukkan bahwa administrasi merupakan proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama, antara sekelompok orang-orang secara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya. Kerjasama antara orang-orang tersebut berlangsung secara dan melalui “organisasi”. Administrasi merupakan suatu jenis tingkah laku atau sikap kelakuan sosial yang tertentu (*administrative behaviour or “administration” as a special type of social behaviour*) yang memerlukan sikap serta kondisi mental yang tertentu, dan merupakan suatu tipe tingkah laku manusia yang tertentu (*special type of human behaviour*).

Administrasi merupakan suatu praktik (*practice*) atau teknik (*technique*) yang tertentu, suatu tata cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, yang memerlukan kemampuan, kemahiran, keterampilan (*skills*) atau kebiasaan yang tertentu yang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Administrasi merupakan suatu sistem (*system*) atau sistema (*systems*) yang tertentu, yang memerlukan input, transportasi, pengolahan dan output yang tertentu. Administrasi merupakan suatu tipe manajemen (*management*) tertentu yang merupakan “*overall management*” daripada suatu organisasi. Jadi administrasi dalam perpajakan akan mendukung dalam proses kepengurusan pajak yang dilakukan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa administrasi perpajakan berpengaruh dominan terhadap perencanaan perpajakan. Hal ini dapat diartikan bahwa administrasi perpajakan dalam hal ini mengenai penentuan jumlah pajak tepat, perhitungan pajak dilakukan secara cermat, penetapan batas waktu pembayaran pajak tepat, penetapan sanksi bagi WP yang melanggar waktu pembayaran pajak, pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan memberikan pengaruh dominan terhadap perencanaan pajak.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan perencanaan pajak padaperusahaandapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap perencanaan pajak.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap perencanaan pajak.
3. Administrasi perpajakan paling dominan mempengaruhi penerapan perencanaan pajak.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas dari hasil analisis data yang dilakukan maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak diharapkan memperhatikan administrasi perpajakan dimana dengan melakukan pencatatan secara sistematis, melaporkan hasil pencatatan dengan baik dan

sistematis sehingga dapat mendukung upaya dari wajib pajak untuk melakukan perencanaan secara tepat terkait dengan kewajiban perpajakannya.

2. Bagi KPP Pratama Batu

- a. Diharapkan KPP Pratama Batu selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak, sehingga sistem panatausahaan dan pelayanan pajak secara maksimal dapat dilakukan. Selain itu KPP diwajibkan melakukan pencatatan (*recording*), penggolongan (*classifying*) dan penyimpanan (*filing*) sehingga wajib pajak mendapatkan berbagai kemudahan dalam proses perpajakan yang harus dipenuhi.
- b. KPP Pratama Batu harus berupaya untuk memberikan jaminan bahwa kebijakan yang ditetapkan benar-benar mampu mendukung upaya untuk memberikan kemudahan dalam proses pembayaran yang dilakukan oleh WP. Jaminan ketepatan dalam proses pembayaran pajak harus dilakukan sehingga upaya untuk memaksimalkan potensi perpajakan dapat secara langsung dilakukan.

3. Bagi fiskus

Dalam upaya untuk memberikan dukungan kepada wajib pajak diharapkan untuk memberikan berbagai kemudahan dan pelayanan dalam proses pembayaran pajak sehingga wajib pajak melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Bagi akademik

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan analisis terhadap perencanaan pajak dan menggunakan variabel lain yang mempengaruhi perencanaan pajak sehingga penelitian yang dilakukan dapat berkembang.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Bird, R & M. de Jantscher, 2005, *Improving Tax Administration in Developing Countries*. International Monetary Fund.
- Darmayasa, Nyoman, 2011, Perencanaan Pajak dari Aspek Rasio Total *Benchmarking*, Kebijakan Akuntansi, dan Administrasi Sebagai Strategi Penghematan Pajak, Jurnal Binis dan Kewirausahaan, Vol. 7 Nomor 3 November 2011.
- Ghozali, Imam. 2011. "*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Husaini, Usman dan Setiady Akbar, Purnomo, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Herlina dan Agus (2013), Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Wajib Pajak di Surabaya, *Tax & Accounting Review*, Vol. 3, No.2, 2013
- Keban, Yeremias. T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta. Gava Media.
- Lumbantoruan, Sophar. 2005. *Akuntansi Pajak*. Cetakan Keempat. Jakarta : Grasindo
- Malhotra, Naresh., 2009, *Riset Pemasaran*, Edisi keempat, Jilid 1, PT Indeks, Jakarta Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011* .Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011
- Mariyana dan Safitri, 2014, Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Dan Revaluasi Aset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak PT.Gembala Sriwijaya.
- Mansury, R. 2005. *Perpajakan Atas Penghasilan dari Transaksi-transaksi Khusus*. Jakarta: YP 4
- Nurmantu, Safri, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Granit
- Pandiangan, Liberti. 2007. *Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo

- Rangkuti, Freddy. 2004. *Riset Pemasaran*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Santoso, Singgih, 2002 *Statistik Parametrik*, Cetakan Ketiga, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Suandi, Erly. 2006. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- _____. 2008. *Hukum Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- _____, 2011 Edisi 5. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Supramono, dan Damayanti, T.W., 2005, *Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan Perhitungannya*, Yogyakarta : Penerbit Andi
- Undang-Undang Pasal 36 Tahun 2008, pasal 2
- Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 pasal 3
- Umar, Husein. 2001. *Metode Riset Perilaku Organisasi*. Jakarta : Gramedia
- Waskito, Agus. 2011. *Mudahnya Menghitung Pajak Penghasilan*. Buku Pintar. Yogyakarta
- Waluyo. 2009 . *Akuntansi Pajak* . Jakarta . Penerbit : Salemba Empat
- Widayat. 2004. *Metode Penelitian Pemasaran Edisi Pertama: Cetakan Pertama*. UMM Press. Malang.
- Wijaya, Tony, 2011, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta, Graha Ilmu,
- Zain, Mohammad, 2005. *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta